

SKRIPSI

***GOVERNANCE COLLABORATION* DALAM PENERAPAN *BLUE*
EKONOMI SEKTOR MARITIM DI KECAMATAN KEPULAUAN
SANGKARRANG KOTA MAKASSAR**



Oleh :

FATUR RAHMAN

105641109220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

***GOVERNANCE COLLABORATION* DALAM PENERAPAN *BLUE*
**EKONOMI SEKTOR MARITIM DI KECAMATAN KEPULAUAN
SANGKARRANG KOTA MAKASSAR****

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

FATUR RAHMAN

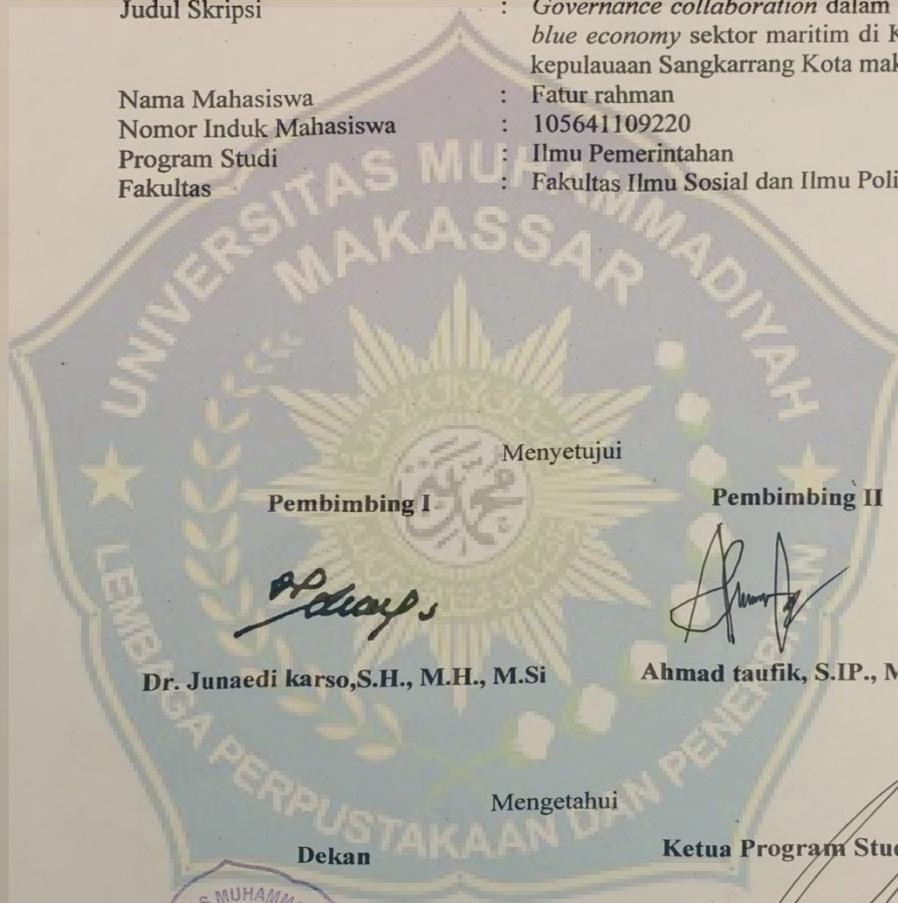
Nomor Stambuk:105641109220

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : *Governance collaboration* dalam penerapan
blue economy sektor maritim di Kecamatan
kepulauan Sangkarrang Kota makassar
Nama Mahasiswa : Fatur rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

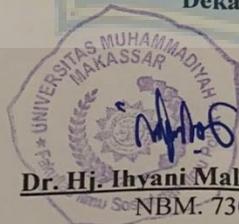
Dr. Junaedi karso, S.H., M.H., M.Si

Ahmad taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

A large, stylized signature is written in blue ink over the name and ID number of the Program Study Head.

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim penguji Skripsi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah makassar berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0234/FSP/A.4II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang di laksanakan di makassar pada hari selasa tanggal 20 bulan february tahun 2024.

Mengetahui:

Dekan

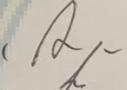
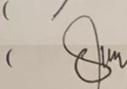
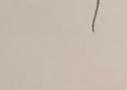
Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Dr. Andi Lunur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 999 797

Tim Penguji:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
2. Muhammad Amril Pratama P, S.IP, M.Si
3. Nursaleh Hartaman, S.IP, M.IP

()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fatur Rahman

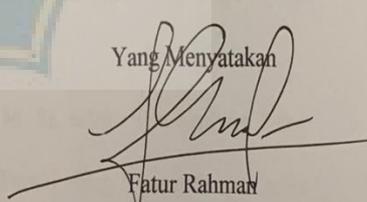
Nomor Stambuk : 105641109220

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan


Fatur Rahman

KATA PENGANTAR



“Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, Inayah-Nya yang tiada henti kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang menggulung tikar-tikar kejahilaaan dan membentangkan tikar-tikar keIslaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Najamuddin dan Ibu Husnawati yang dengan ikhlas memberikan segalanya baik moril maupun meteril, tak lupa iringan doa di setiap sujudnya hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr Juanaedi Karso, S. H. , M. H. , M. Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S, IP. , M. AP selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak

dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tidak ternilai harganya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos. , M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang juga telah membantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. SOD Sangkarrang, YKL Indonesia dan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang dengan senang hati membantu dengan bersedia menjadi Narasumber penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Pemerintah kota Makassar dan kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa FISIP 2020 yang sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian akhir atas kesetiaan dan dukungan yang telah diberikan .

9. Kepada seluruh lembaga dan sirkel dan bestie,sahabat (Mars dont, hifemi,warkop transisi,satgas typo dan lain lain) dan terkhusus juga kepada mutmainnah,kak aqmal, kak ikhsan, kak fiska yang senantiasa mensupport penulis.
10. Kepada Seluruh teman teman, Kakanda, Adinda, dan teman lainnya yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai. Terima Kasih.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Serta bermanfaat juga untuk Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2024

FATUR RAHMAN

ABSTRAK

Fatur rahman 2024. Governance collaboration sektor maritim dalam penerapan blue economy di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. (Dibimbing oleh Junaedi Karso dan Ahmad Taufik).

Tujuan penelitian adalah menjelaskan komponen kolaborasi lembaga yang dilakukan oleh pemerintah, LSM dan Swasta dalam penerapan ekonomi biru di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Penelitian menunjukkan bahwa komponen kolaborasi diantaranya: Dialog tatap-muka yang dilakukan seperti rapat-rapat berjalan dengan baik karena ketika rapat di laksanakan organisasi yang hadir saling memahami. Membangun kepercayaan dalam menyampaikan pendapat, informasi serta saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati, Komitmen pada proses dimana organisasi yang terlibat mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, kesadaran bahwa adanya tugas dari masing-masing lembaga yang berkolaborasi. Pemahaman Bersama mampu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkolaborasi. Dampak sementara telah mengalami peningkatan terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. (2) Faktor pendukung komponen kolaborasi yaitu adanya Kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang, serta adanya Pemberian Bantuan dan pelatihan terhadap masyarakat dan LSM, Sedangkan faktor penghambat komponen kolaborasi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan laut, kurangnya anggaran di setiap program kegiatan.

Kata kunci: **Kolaborasi Pemerintah, blue economy, maritim**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	11
C. Kerangka Berpikir	22
D. Fokus Penelitian	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Tempat penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan.....	28
E. Teknik Analisis Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi objek penelitian.....	31
B. <i>Governance Collaboration</i> dalam Penerapan <i>Blue Economy</i> dalam Sektor Maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar	38
C. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>governance collaboration</i> dalam Penerapan <i>Blue Economy</i> dalam Sektor Maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar	59
D. Pembahasan.....	64

BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi geografis yang letaknya sangat strategis di garis khatulistiwa merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia. Laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan maritim negeri. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah daratan seluas 1,9 juta km² yang tersebar pada 17.500 buah pulau-pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5,8 juta km². Jasa Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor memerlukan sebuah kebijakan yang selaras dengan sektor ekonomi kelautan, mengingat adanya keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun di luar sektor (Anggrain & Mashur, 2022).

Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia, terkenal dengan letak geografisnya yang strategis dan sumber daya laut yang melimpah. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang khususnya menonjol karena garis pantainya yang luas sehingga menawarkan banyak peluang pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan maritim. Namun, pemanfaatan potensi ini memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang sejalan dengan upaya global untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan di sektor maritim. Kota Makassar memiliki potensi maritim yang besar, terutama di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang memiliki wilayah pesisir yang luas. Pengembangan sektor maritim menjadi penting dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menjaga sumber daya alam.

Letak dan status Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah pulau yang terdiri dari pantai dan memiliki ketinggian dari permukaan laut kurang dari 500 M. klasifikasi semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah swasembada. penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah 13. 703 Jiwa yang terdiri dari 6. 748 jiwa laki-laki dan 6. 955 jiwa perempuan yang terbagi lagi dalam 3. 451 KK dan 57 RT serta 15 RW. Mata pencaharian masyarakat umumnya adalah sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai pengrajin perahu. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 3 Kelurahan dengan luas wilayah 54, 23 ha. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barrang Lompo memiliki luas wilayah 19, 23 ha, Kelurahan Barrang Caddi memiliki luas wilayah 38, 19 ha yang terdiri dari 5 (lima) pulau yaitu pulau lumu-lumu, pulau lanjutang, pulau bone tambu, pulau langkai serta pulau barrang caddi itu sendiri, sedangkan Kelurahan terakhir yaitu Kelurahan Kodingareng memiliki luas wilayah 14 ha yang terdiri dari pulau kodingareng dan pulau kodingareng keke yang tak berpenghuni (Kurniati et al. , 2021)

Blue ekonomi adalah pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sektor maritim yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk mengimplementasikan blue ekonomi secara efektif, diperlukan kerjasama (*collaboration*) yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku industry (Neill, 2022).

Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah disepakati oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan pembaharuan terkait konsep dari

Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan SDGs memiliki 17 tujuan yang didalamnya terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. Jika pada awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, yaitu *people, planet, prosperty, peace, dan partnership* (Prayuda & Sary, 2019)

Dari sektor maritim, Kota Makassar cukup potensial untuk peningkatan sumber daya alam. Seperti halnya di kecamatan kepulauan sangkarrang yang termasuk dalam wilayah administrasi kota makassar. Keanekaragaman hayati yang dimiliki cukup menarik perhatian wisatawan, selain itu kecamatan kepulauan sangkarran kota Makassar juga memiliki gugusan pulau-pulau yang masing-masing memiliki karakter eksotik yang berbeda-beda. Sebagai contoh pulau Kodingareng Keke, pulau ini memiliki nilai estetika *Coral reefs* dengan formasi yang membentuk lereng vertikal. Makassar saat ini telah menjadi kota pengekspor ikan jenis pelagis dan ikan karang untuk kawasan Negara-negara Asia (Singapura, Hongkong, Cina, dan Filipina) dan bahkan ke benua Amerika (Amerika Serikat). Selain itu terdapat pula jenis karang keras yang di budidayakan untuk penghias akuarium. Jenis Karang ini juga telah berhasil di ekspor ke luar negeri. Dengan keadaan seperti ini, tentunya dapat meningkatkan kualitas ekonomi daerah. Selain itu Kota Makassar dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya dapat terekspos secara luas. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan terhadap perkembangan wilayah makassar pada umumnya, karena akan semakin banyak wisatawan atau

tourism yang akan berkunjung dan menarik investor-investor baru (Lingkungan et al. , 2008)

Istilah *Blue* Ekonomi sebuah pemikiran atau paradigm yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan dibidang kelautan dan perikanan. Konsep Ekonomi Biru mewakili perubahan paradigma dalam cara kita mendekati dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Konferensi ini sangat menekankan keberlanjutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab, dan mengakui bahwa kesehatan laut sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perekonomian global. Kerangka Ekonomi Biru menggabungkan tiga dimensi utama: Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial (Prayuda, 2019).

Satu dekade terakhir ini telah menyaksikan timbulnya konsep populer, Ekonomi Biru, dengan pendekatan untuk melestarikan lautan dan sumber daya laut planet kita. Muncul pada tahun 2012 di konferensi PBB di Rio Janeiro, Ekonomi Biru merupakan pengembangan dari Ekonomi Hijau. Secara umum didefinisikan sebagai "penggunaan sumber daya laut dan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesejahteraan manusia, tanpa degradasi lingkungan"(Hisyam et al. , 2022).

Visi Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Makassar 2005-2025 yaitu "Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang

Berorientasi Global, Berwawasan lingkungan dan paling bersahabat” dan melaksanakan Misi Pembangunan Kota Makassar 2005-2025 (Iptek & Lipi, 2015)

Di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang partisipasi masyarakat dalam penerapan ekonomi biru sangat penting karna seluruh penduduk di kecamatan ini tersebar di beberapa pulau-pulau kecil yang berjauhan dengan ibu kota pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadi kendala yang dialami didalam proses penerapan ekonomi biru (Kurniati et al. , 2021).

Dalam penerapan suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi adalah hubungan yang dimaksudkan untuk menangani suatu masalah dengan membuat jawaban dalam keadaan hambatan seperti data terbatas, keberadaan. Raharja dalam Kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual dan dalam maka di butuhnya kolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal (Anggrain & Mashur, 2022).

Terdapat tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. organisasi dalam konteks governance harus berorientasi pada organisasi yang bertindak memfasilitasi dan mampu beroperasi di dalam jaringan antar organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, atau mampu menyelesaikan dengan mudah dibanding dengan dilakukan sendiri oleh organisasinya. Di dalam kerjasama tersebut paling kurang terdapat tiga tingkatan pemerintahan dan berbagai tipe kerjasama dengan non pemerintah, banyak literatur yang memandang bahwa kolaborasi sebagai sasaran itu sendiri

dari pada sebagai seperangkat hubungan yang menawarkan resiko dan penghargaan, kebutuhan untuk berkolaborasi muncul karena adanya saling keterkaitan diantara pemain (aktor dalam organisasi), juga karena masing-masing aktor memiliki tipe, level teknologi dan sumberdaya yang berbeda namun mereka butuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Saling keterkaitan tersebut akan mendorong peningkatan frekuensi dan intensitas (Zainuddin, 2019)

Teori *Collaborative Governance* merupakan salah satu konsep penyelenggaraan pemerintahan yakni penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Salah satu strategi yang dilakukan sebagai model rencana pemerintah yang dilakukan secara bersama untuk suatu negara dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, menggunakan strategi tersebut dengan dasar untuk memaksimalkan kinerja dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan yang ikut serta dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Ansell dan Gash, Salah satu konsep yang diselenggarakan oleh aparatur Pemerintah dengan melibatkan para stakeholder non –state secara langsung terkait proses pembuatan kebijakan yang formal dengan cara konsensus dan deliberative dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada suatu negara tersebut serta mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan yang dimaksud. Teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash merupakan proses keputusan dalam suatu pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan beberapa lembaga publik serta organisasi non pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan bertujuan

untuk menyelesaikan masalah publik. secara bersama–sama untuk mencapai tujuan. (Yunifar, 2023)

Pada dasarnya untuk mengembangkan penerapan kebijakan dalam pemerintah di perlukan kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Maka dari itu untuk mewujudkan *good government* di sektor maritim perlu diterapkan konsep *blue* ekonomi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar serta merumuskan bentuk kerjasama (*governance collaboration*) yang optimal untuk penerapan blue ekonomi tersebut.

Manfaat penyelesaian masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi pada pemahaman konsep *blue* ekonomi dan cara implementasinya dalam sektor maritim tentunya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dan Menjadi Rekomendasi bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan sektor maritim yang berkelanjutan Serta Menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan sektor maritim dan penerapan konsep *blue* ekonomi di wilayah lain.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu;

1. Bagaimana *governance collaboration* dalam penerapan *Blue Economy* sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar?"

2. Apa faktor pendorong dan penghambat *governance collaboration* dalam penerapan *Blue Economy* sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi konsep blue ekonomi yang dapat diterapkan dalam pengembangan sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang serta merumuskan bentuk kerjasama (*governance collaboration*) yang optimal untuk penerapan *blue* ekonomi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi pada pemahaman konsep *blue* ekonomi dan cara implementasinya dalam sektor maritim.
2. Rekomendasi bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan sektor maritim yang berkelanjutan.
3. Menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan sektor maritim dan penerapan konsep *blue* ekonomi di wilayah lain.

BAB II

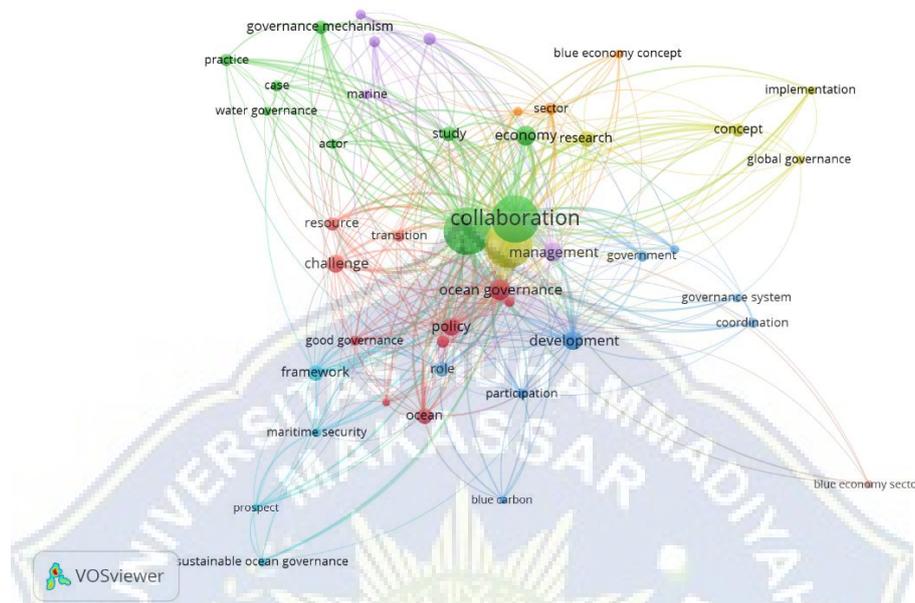
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui muatan kajian - kajian sebelumnya. Dengan fokus penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bantuan VOSviewer. VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkat ini mempunyai dua fungsi utama: (1) Membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia; dan (2). Memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. VOSviewer menyediakan tiga bentuk visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, *overlay* dan kepadatan. (Budianto, 2022).

Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan dengan menggunakan *publish or perish* ditemukan 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2019-2023 yang dimana artikel-artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci *governance collaboration* implementasi *blue* ekonomi sektor maritim. Artikel-artikel ini kemudian dikelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti.

Berikut merupakan kajian - kajian data penelitian terdahulu menggunakan vosviewer.



Gambar 2. 1 penelitian terdahulu

Sumber: Diolah oleh VOSviewer, 2023

Dari hasil olah data *vosviewer* ada 73 items dan beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya yang berfokus kepada efektivitas ekonomi biru sebagai pembangunan berkelanjutan di Seychelles, dan Mauritius (Hisyam et al. , 2022) dan Konsep Ekonomi Biru dalam Melindungi Ekosistem Laut di Indonesia dan Tiongkok (Khairunnisa, 2022).

Selain itu ada juga penelitian yang fokus membahas *governance collaboration* seperti peneltian Tianming & Erokhin, 2021 yang membahas tentang Kerjasama ilmiah di Arktik yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir oleh dua negara yaitu China dan Russia (Tianming & Erokhin, 2021).

Selanjutnya ada juga penelitian terdahulu dari yang fokus membahas tentang implementasi Kebijakan Berbasis *Blue Economy* dalam Kerangka Kerjasama dengan FAO : Studi mengenai Unit Pengelolaan Ikan di Kabupaten Lombok Utara (Chandra et al. , 2021)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *blue* ekonomi, *collaboration governance* dan implementasi kebijakan di sektor maritim masih minim yang membahas tentang *governance collaboration* implementasi blue ekonomi sektor maritim khususnya di daerah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

B. Kajian Teori

1. *Governance collaboration*

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa makna kolaborasi adalah Pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non- negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik Namun, *collaborative governance* juga sering melibatkan kemitraan antar lembaga publik dan dapat menggabungkan kemitraan antar lembaga dan antar pemerintah.

Selanjutnya menurut Ansell and Gash menjelaskan terdapat 5 (lima) indikator dari prosterbentuknya *collaborative governance* yang terjalinoleh

pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020)

- a. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka) Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman Bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan Ansell and Gash, Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi di takutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi
- b. *Trust Building* (membangun kepercayaan) Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.
- c. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses) Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan

yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

- d. *Shared Understanding* (saling memahami) *Stakeholders* dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga di definisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi
- e. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kolaborasi, perencanaan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tugas pada masing-masing stakeholders guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Emerson juga menjelaskan *Collaborative Governance* adalah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau lingkungan publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain. Dalam pandangan ini, faktor kepemimpinan menjadi titik balik dalam kolaborasi, pengambilan keputusan tidak terlepas dari aktor-aktor yang terlibat (Maulana, 2020)

Kolaborasi menurut Wanna berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok, atau organisasi yang bekerja sama dalam beberapa Upaya (Akbar et al. , 2022).

Kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual dan Ganie Rochman dalam maka di butuhnya kolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal. *Collaborative governance* Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah public melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Choi & Robertson dalam mendefinisikan bahwa *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholders memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Kerjasama kolaboratif terjadi dengan adanya penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas masing-masing pihak yang berkaitan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independent dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Anggrain & Mashur, 2022)

Terdapat 3 dimensi dalam *collaborative governance* menurut Emerson, (Rupita et al. , 2021), yaitu sebagai berikut:

a. Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang lingkup/system context yang menaungi. Dimensi pertama ini memiliki 7 elemen yaitu:

- 1) *Resource Condition* (Sumber daya yang dimiliki),
- 2) *Policy and Legal Framework* (Kebijakan dan kerangka hukum),
- 3) *Level of Conflict/Trust* (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan),
- 4) *Socioeconomy*; Kesehatan; Budaya; dan ragam (Potret Kondisi),
- 5) *Prior failure to Address Issues* (Kegagalan yang ditemui di awal)
- 6) *Political dynamics/power relations* (Dinamika politik)
- 7) *Network connectedness* (Jaringan yang terkait)

b. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep *Collaborative Governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Kondisi sekarang pada awal kolaborasi dapat baik memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan dan antara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka kerja cenderung mencampuradukkan konteks dan kondisi sistem dengan *drive* khusus kolaborasi. Sebaliknya, kerangka kerja yang memisahkan kontekstual *variable* dari *driver* penting, tanpa dorongan untuk berkolaborasi tidak akan berhasil terungkap. Dimensi kedua ini memiliki 4 komponen yaitu:

- 1) *Leadership*, mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dalam membantu mempersiapkan sumber daya.

- 2) *Consequential incentives*, mengarah pada bagian baik (masalah sumberdaya, kepentingan, atau kesempatan), maupun eksternal (krisis, ancaman, kesempatan situasional/institusional)
 - 3) *Interdependence*, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak.
 - 4) *Uncertainty*, ketidak pastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan *public*.
- c. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :
- 1) *Principled Engagement*,
 - 2) *Shared Motivation*,
 - 3) *Capacity for Join action*

2. Teori Blue Ekonomi

Konsep ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada *United Nation Conference on Sustainable Development (UNCSD)* pada tahun 2012 atau yang biasa disebut dengan "Rio +20". Konferensi ini dihadiri oleh seluruh negara anggota PBB, dimana topik pertemuan difokuskan pada isu-isu mengenai praktik pembangunan berkelanjutan antar negara.

Salah satu fokus dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mengenai tata cara penerapan ekonomi hijau. Green Economy sendiri merupakan salah satu contoh konsep ekonomi dengan menerapkan perlunya pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan, dimana diharapkan dengan diterapkannya prinsip ini,

perkembangan ekonomi di setiap negara akan diikuti dengan menjaga dan merevitalisasi ekosistem lingkungan.

Seperti yang dapat dilihat dari penjelasannya, ekonomi biru sendiri merupakan bentuk perwujudan lain dari prinsip ekonomi hijau ini, bedanya ekonomi "biru" berfokus pada pemberdayaan ekosistem laut, khususnya sumber daya laut. SDGs ini membantu untuk memperkenalkan program pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat diikuti dengan kerjasama internal dan eksternal antar negara terkait pemberdayaan lingkungan seperti pengurangan sampah, bahkan beberapa implementasinya adalah terkait kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi (Khairunnisa, 2022)

Konsep blue economy pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Belgia Gunter Pauli dalam bukunya *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs*. Dalam buku ini, pertama kali diterbitkan pada tahun 2010, penulis mengusulkan perubahan proses industri untuk mengatasi masalah lingkungan. Ini dapat dicapai dengan mengganti sumber daya energi yang langka dan mahal dengan teknologi yang lebih sederhana dan lebih bersih. Bank Dunia sekarang mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mata pencaharian dan melindungi ekosistem laut.

Gunter Pauli juga mengatakan bahwa ekonomi biru ini merupakan model ekonomi dan sosial yang baru. Model ekonomi ini berbeda dengan ekonomi merah (*red economy*) saat ini yang membersihkan bumi ini dan ekonomi hijau (*green economy*) yang hanya berfokus pada energi alternatif. Tetapi ekonomi biru

mengambil inspirasinya dari alam, mengambil apa yang dibutuhkannya dan bersimbiosis atau saling menguntungkan dengan apa yang di kandungnya. Tujuan akhir dari konsep ekonomi biru adalah *blue ocean* dan *blue sky*. Masyarakat memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga memiliki kemampuan untuk menjaga keindahan langit, terutama laut tetap asri dan memanfaatkannya secara berkelanjutan (Palgrave et al. , 2010)

Blue economy merupakan konsep paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan laut sebagai input utama dalam pembangunannya. Dari definisi tersebut mengarah pada kekayaan apa saja yang ada di dalam laut yang dapat dieksplorasi sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Namun dalam eksplorasi tersebut tetap mengedepankan keberlanjutan dari input produksinya (Banu, 2020)

Ekonomi Biru, dengan pendekatan untuk melestarikan lautan dan sumber daya laut planet kita. Muncul pada tahun 2012 di konferensi PBB di Rio Janeiro, Ekonomi Biru merupakan pengembangan dari Ekonomi Hijau. Secara umum didefinisikan sebagai "penggunaan sumber daya laut dan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesejahteraan manusia, tanpa degradasi lingkungan"(Hisyam et al. , 2022).

3. Pengembangan sektor maritim di kecamatan kepulauan sangkarrang

Dalam KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “maritim” adalah merujuk kepada: (1) segala sesuatu yang berkenaan dengan laut; dan (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Istilah “maritim” juga selalunya disinonimkan dengan perkataan “bahari”, yang bermaksud: (1) dahulu kala, kuno;

(2) indah, elok sekali; dan (3) mengenai laut atau bahari. Oleh yang demikian, dapatlah dirumuskan bahawa istilah “maritim” adalah merujuk kepada bidang pengajian yang bersangkutan-paut dengan aktiviti atau kegiatan manusia di masa lampau, yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, terutamanya pelayaran dan perdagangan

Dalam Wikipedia *Encyclopedia*, merujuk istilah “maritim” sebagai “*primarily an adjective that describes objects or activities related to the sea*” atau “kata sifat untuk menggambarkan objek atau aktiviti yang berkaitan dengan laut”. Dari segi sejarahnya, istilah “maritim” adalah satu istilah baharu dan tidak terbit daripada bahasa Melayu, melainkan dipinjam daripada bahasa Inggeris. Kerana itu, peradaban atau tamadun berasaskan kelautan yang dibangunkan oleh para pelaut di Nusantara atau Kepulauan Melayu pada masa dahulu tidak pernah disebut sebagai tamadun maritim, melainkan peradaban atau tamadun Melayu sahaja, kerana perkataan “Melayu” sudah menggambarkan manusia-pelaut (*seafarers*) dan istilah “maritim” hanya wujud pada abad ke-14 Masihi, iaitu pada zaman Renaissance (kebangkitan) apabila bangsa-bangsa Eropah mula mengalihkan pandangan dunia atau worldview mereka daripada berorientasikan kepada daratan juga kepada laut dan lautan (Keliat, 2009)

Negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran secara umum. Contoh negara maritim diantaranya: Inggeris, Amerika Serikat, Singapura, Cina, dan Panama. Negara-negara tersebut dikategorikan sebagai negara maritim, karena melakukan manajemen pembangunan wilayah perairan lautnya secara sungguh-sungguh,

komprehensif, terencana dan berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang dan fakta sejarah, bangsa Indonesia pernah berjaya dalam kemaritiman. Tercatat beberapa kerajaan yang pernah ada di Indonesia dikenal sebagai penguasa maritim, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Bone dan lain-lain. Jejak fakta sejarahnya bahkan ditemui di Madagaskar. 2 Kata maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, maritime atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu negara maritim atau negara samudera. Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Dalam bahasa Inggris, kata maritime untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut. Dilihat dari sisi tata bahasa, kelautan adalah kata benda, maritim adalah kata sifat. Dengan demikian, kalau ingin menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memanfaatkan laut, rasanya kata maritim lebih tepat. Indonesia harus menjadi negara maritim, bukan hanya negara kelautan. Argumentasinya adalah, negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.

Dilihat dari arti kata secara luas, kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi, hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah maritim sesungguhnya lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat laut secara fisik,

wadah dan isi, tetapi juga melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudera serta merupakan wilayah laut yang sangat penting bagi perdagangan dunia (Kadar, 2015)

Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan, merupakan program program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim guna menangkal adanya ancaman. Secara konseptual, pembangunan pertahanan maritim negara dapat dibangun dengan mengacu pada kerangka pertahanan, yakni *ends, means, dan ways*, dimana *ends* untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh, sedangkan *means* membentuk sea power yang kuat, dan *ways* melaksanakan *sea control dan power projection ashore*. Untuk mewujudkan hal ini juga diperlukan koordinasi yang kuat antara instansi yang terlibat. Masing-masing instansi tersebut tentunya perlu ditanamkan persepsi “doktrin pertahanan maritim” yang sama, yaitu menggaris bawahi peran secara bersama-sama dan menyeluruh untuk mensinergikan kekuatan maritim (Arto et al., 2019)

Wilayah kepulauan yang terdapat di Kota Makassar tergabung dalam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan termuda yang terbentuk tahun 2017. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terletak dibagian utara yang merupakan satu dari lima belas Kecamatan yang terdapat dalam wilayah administrasi Kota Makassar. Transportasi yang melayani pergerakan masyarakat dari wilayah gugus pulau ke Kota Makassar terselenggara secara reguler dengan tujuan Dermaga Kayu Bangkoa dan Pelabuhan Paotere. Trayek reguler yang ada hanya melayani Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Kodingareng Lompo (Mappangara, 2021)

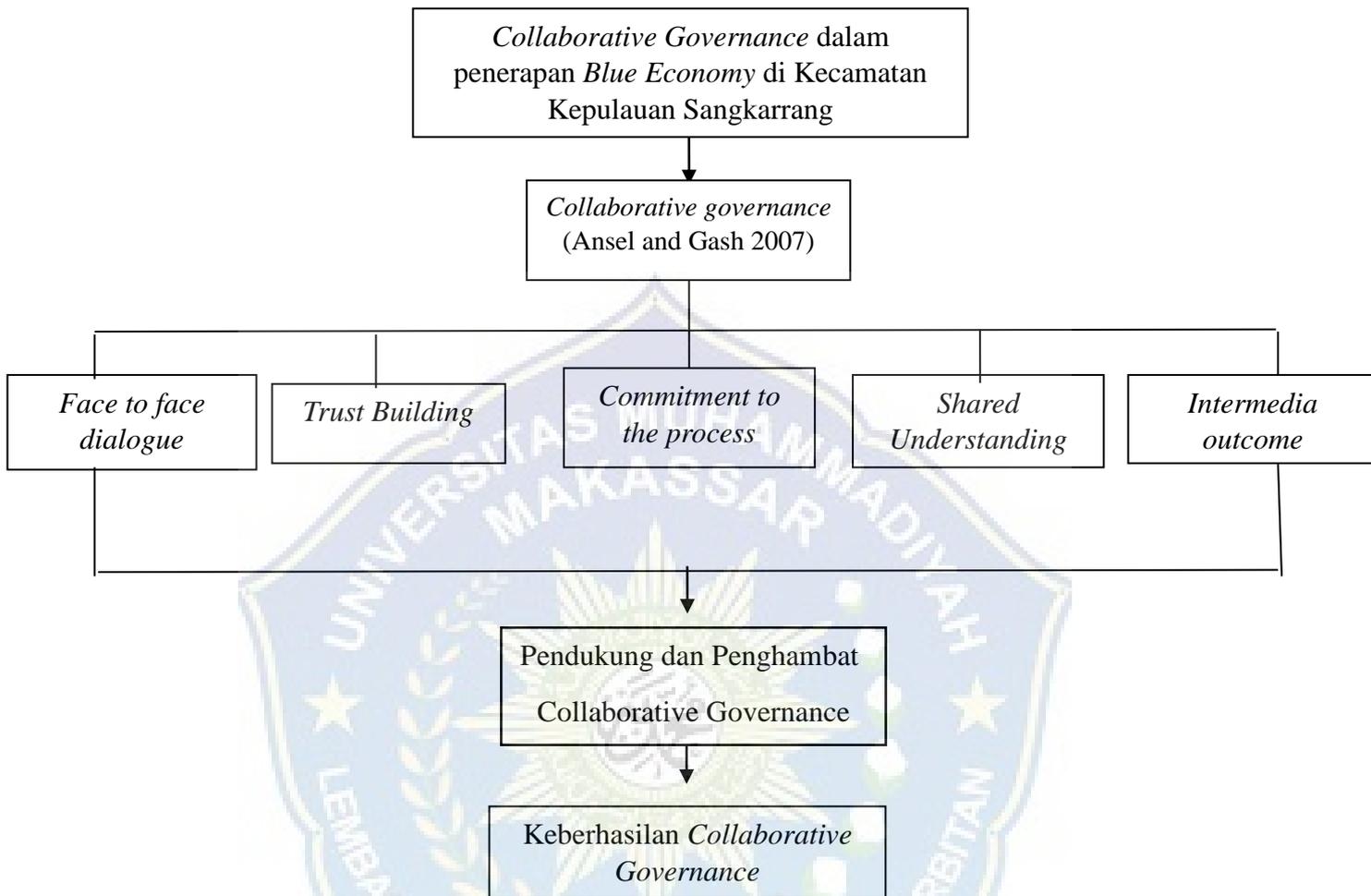
C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir (atau *framework* dalam bahasa Inggris) adalah struktur konseptual atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, mengorganisasi, dan memecahkan masalah. Ini adalah kerangka kerja atau model konseptual yang membantu seseorang dalam mengatasi situasi atau tugas tertentu. Kerangka pikir adalah alat kognitif yang membantu seseorang dalam merencanakan, berpikir, dan mengambil keputusan.

Ansell & Gash menjabarkan proses kolaborasi menjadi lima indikator, yakni sebagai berikut (Akbar et al. , 2022) :

1. *Face-to-Face Dialogue*, (dialog tatap muka).
2. *Trust Building*, (membangun kepercayaan).
3. *Commitment to the Process*, (komitmen terhadap proses).
4. *Shared Understanding*, (saling memahami).
5. *Intermediate Outcomes*, (hasil akhir yang dicapai).

Gambar 2. 2 Kerangka pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini perlu di lakukan pembatasan pembahasan guna memfokuskan pada permasalahan tertentu agar tidak terjadi perluasan atau semakin melebarnya pembahasan. Selain itu, batasan masalah dalam sebuah penelitian digunakan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik dalam tulisan ini peneliti akan membatasi kajian penelitian pada *governance collaboration* penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Berdasarkan bagan kerangka pikir, penelitian ini berfokus pada *Governance collaborasi* dalam penerapan *Blue* ekonomi sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

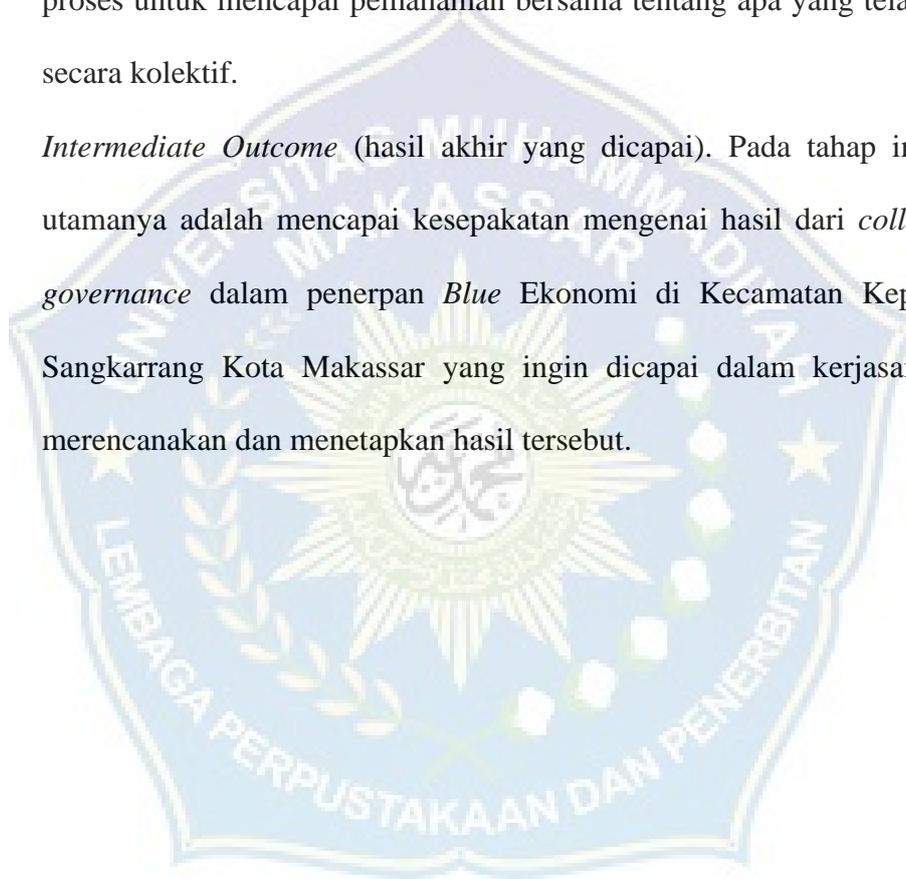
E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi gambaran indikator yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka). Pada tahap dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan yang terlibat, diharapkan dapat terbentuk kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap rencana kolaborasi dalam penerapan *Blue* Ekonomi yang telah dirancang dan akan dilaksanakan. Dimana dialog tatap muka adalah langkah awal yang sangat krusial dalam kolaborasi.
2. *Trust Building* (membangun kepercayaan). Kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kolaborasi. Dalam konteks kolaborasi, bukan hanya masalah perundingan atau tawar-menawar yang penting, melainkan juga tentang membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat karena kepercayaan memiliki nilai yang sangat besar dalam jangka panjang dalam proses kolaborasi.
3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses). Pada tahap ini proses untuk membangun keyakinan bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan penerpan *Blue* Ekonomi di Kecamatan Kepulauan

Sangkarrang Kota Makassar. Komitmen dalam mengimplementasikan untuk memerlukan langkah-langkah yang transparan, adil, dan terstruktur dari semua pihak yang terlibat.

4. *Shared Understanding* (saling memahami). Pada tahap ini suatu titik dalam proses kolaboratif, pihak-pihak yang terlibat memerlukan pengembangan proses untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang telah dicapai secara kolektif.
5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai). Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan mengenai hasil dari *collaborative governance* dalam penerapan *Blue* Ekonomi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang ingin dicapai dalam kerjasama, serta merencanakan dan menetapkan hasil tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal dan setelah surat izin penelitian telah dikeluarkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makkassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mencari teori. Ciri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitik beratkan pada observasi alamiah. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel (Mappasere & Suyuti, 2019).

Sejalan dengan tujuan untuk melihat *collaborative governance* dalam konteks penerpan *Blue* ekonomi. Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik yang sangat relevan untuk tujuan penelitian ini. Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai *collaborative governance* dalam penerpan *Blue* ekonomi dan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi beragam pandangan, pendapat, dan pengalaman

dari berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan *Blue* ekonomi. Ini sangat penting karena *collaborative governance* sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif yaitu fokus diberikan pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam penerapan *Blue* Ekonomi. Penelitian deskriptif juga sangat sesuai untuk menggali pandangan dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan *Blue* Ekonomi. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemangku kepentingan tersebut berkontribusi dalam kolaborasi, serta kendala atau masalah yang mereka hadapi.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek yang ada diteliti (responden) atau diperoleh informasi dasar di lapangan, instrumen yang peneliti gunakan yaitu wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui membaca atau belajar perpustakaan, buku atau literatur yang berhubungan

dengan masalah tersebut Internet, dokumen kelembagaan dan laporan berkaitan dengan kebutuhan informasi penelitian

D. Informan

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan jumlah informan yang di pilih rencananya yaitu:

NO	NAMA	LEMBAGA	KETERANGAN
1	Andi Ashar,SH. (AA)	Pemerintah	Camat Sangkarrang
2	Syahrul Harijo,S.PI (SH)	SOD Sangkarrang	Ketua
3	Irwan dessibali (ID)	YKL indonesia	Direktur eksekutif
4	Muhammad Adnan (MA)	Masyarakat	Nelayan
5	Lukman (LK)	Pemerintah	Staff perekonomian dan Pembangunan
6	Ismail muchtar,S.Sos (IM)		
7	Helza sein	masyarakat	Nelayan
8	Rahmat	masyarakat	Nelayan

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara peneliti mengelola data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan penelitian, karena informasi yang diperoleh dari penelitian tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, analisis data menjadi bagian yang sangat penting metode ilmiah, karena menganalisis data ini bisa

lebih dalam pemecahan masalah yang signifikan dan bermakna. Mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi, yaitu data yang diterima dari lapangan dituangkan ke dalam formulir laporan kemudian direduksi, dipadatkan, difokuskan pada hal-hal penting. Carilah tema dan pola yang disusun secara sistematis. Informasi tentang itu dikurangi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Display*)

Data disajikan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian membuat deskripsi masalah harus dipelajari secara deskriptif.

3. Triangulasi data

Selain reduksi data, peneliti juga menggunakan Teknik triangulasi sebagai metode untuk mengecek kebenaran data. Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan sesuatu yang lain sebagai perbandingan hasil wawancara penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pengamatan yang mencakup catatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung yang berkaitan dengan *governance collaboration* dalam penerapan *blue* ekonomi maritim sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara langsung (*direct communication*) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam sebuah wawancara, ada proses interaktif antara pewawancara dan informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menyempurnakan teknik tersebut observasi dan wawancara, serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumenter industri dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memverifikasi keakuratan informasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian

1. Deskripsi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara administratif kota makassar adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kota Makassar.

Adapun letak geografis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang antara lain sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep),
- b. Sebelah Selatan dengan wilayah kabupaten takalar,
- c. Sebelah Timur dengan wilayah daratan utama kota makassar, dan
- d. Sebelah Barat dengan pesisir pantai Selat Makassar.

a. Visi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

“Percepatan mewujudkan makassar kota dunia yang ‘sombere dan smart city’ dengan imunitas kuat untuk semua”

- b. Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Revolusi sumber daya manusia dan percepatan Reformasi Birokrasi menuju sumber daya manusia kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
- 2) Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua.
- 3) Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah sebuah Kecamatan yang berada di wilayah terluar di Kota Makassar Kondisi geografis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Cukup unik karan memiliki wilayah yang terpisah dengan daratan utama Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berbentuk kepulauan dan terbagi menjadi tiga kelurahan yang diberi nama dari masing-masing pulau utamanya. Penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang utamanya bekerja sebagai nelayan

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang utamanya terbentuk sebagai hasil pemekaran dari tiga pulau dalam Kecamatan Ujung Tanah. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Makassar. Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada tahun 2017 dan menjadikannya sebagai kecamatan termuda di Kota Makassar pada tahun tersebut. Sebelum terbentuknya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, jumlah kecamatan di Kota Makassar hanya empat belas.

Letak wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berada di bagian utara Kota Makassar. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan dengan wilayah tersempit di Kota Makassar karena hanya mencakup 0,88% dari total luas Kota Makassar. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah 54,23 ha. Wilayahnya terbagi menjadi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Barrang Lompo, Kelurahan Barrang Caddi dan Kelurahan Kodingareng. Tiap nama kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan nama pulau utama di dalam kelurahan tersebut. Ketinggian rata-rata pada tiap kelurahan tidak mencapai 500 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kelurahan Barrang Caddi meliputi lima pulau yaitu Pulau Barrang Caddi, pulau Lumu-lumu, pulau Lanjukang, pulau Bone Tambu, dan pulau Langkai. Sedangkan wilayah Kelurahan Kodingareng meliputi dua pulau yaitu pulau Kodingareng (berpenghuni) dan pulau Kodingareng Keke (tidak berpenghuni) serta kelurahan Barrang lompo yang hanya meliputi satu pulau sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Sebuah kolaborasi dapat dilihat dalam penerapan *blue economy* di sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, yakni melibatkan beberapa organisasi penting yaitu organisasi atau Lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta) serta kelompok masyarakat. Dalam konteks ini peneliti mengkaji tentang kolaborasi lembaga atau organisasi dalam penerapan *blue economy* dalam sektor

maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Adapun deskripsi lembaga/organisasi yang terlibat dalam Kolaborasi adalah sebagai berikut:

2. Sangkarrang Ocean Dive

a) Profil sangkarrang ocean dive

Sangkarang Ocean Dive (SOD) adalah salah satu komunitas pemuda selam yang bertempat di pulau barrang lompo, Kecamatan kepulauan sangkarrang, sangkarang ocean berdiri pada tanggal satu juni tahun 2021, jumlah keanggotan sangkarrang ocean dive sebanyak 17 orang, dan didominasi para pemuda kepulauan sangkarrang, sangkarrang Oceb dive memiliki visi, menjaga dan aktif dalam upaya –upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut, khususnya terumbu karang, menjadikan perairan kepulauan Sangkarang sebagai daerah destinasi wisata bahari unggulan di wilayah provinsi sulawesi selatan, melakukan upaya-upaya edukasi serta peyadaran lingkungan perairan kepada masyarakat kepulauan sangkarang.

Kegiatan pertama yang dilakukan Sangkarrang Ocean Dive (SOD) adalah melakukan kegiatan pengibaran bendera bawah laut yang dirangkaikan dengan pembersihan sampah bawah laut yang melibatkan beberapa lembaga kepemudaan kepulauan sangkarrang, komunitas selam dan beberapa lembaga pemerintah, selanjutnya kegiatan kedua melakukan upaya-upayan pemulihan ekosistem

terumbu karang di wilayah perairan barrang lompo dengan metode transplantasi karang, yang berjalan hingga saat ini.

b) Tujuan dan target sangkarrang *ocean dive*

Adapun tujuan serta sasaran atau target yang akan dicapai adalah:

1) Tujuan

- a) Tumbuhnya kesadaran pemuda kepulauan dan masyarakat umum terhadap pentingnya dalam menjaga kelestarian lingkungan
- b) Terciptanya sumber daya manusia berkualitas di bidang kelautan khususnya untuk kegiatan penelitian dan aktivitas bawah laut.
- c) Terciptanya lingkungan yang lestari sehingga mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan

2) Target

- a) Terjaganya keberlanjutan ekosistem terumbu karang pada wilayah Perairan Barrang lompo secara khusus dan Kepulauan Sangkarrang secara umum
- b) Mendorong lahirnya pengembangan potensi wisata bahari Perairan di Pulau barrang lompo dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan adanya daerah Coral Stok Center.

c) Medorong kesadaran pemuda akan pentingnya menjaga ekosistem laut di kawasan Kepulauan Sangkarrang

3. Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia

a) Profil Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia

Secara historis, YKL Indonesia lahir dan bangkit sebagai sebuah perwujudan dari semangat kesadartahuan, yang selanjutnya menjadi semangat dasar setiap pergerakan YKL Indonesia. Hal tersebut datang dari kesadaran kritis, bahwa sumberdaya kelautan mesti dikelola dengan prinsip-prinsip keseimbangan antara eksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestariannya secara berkelanjutan.

b) Visi dan Misi

1) Visi

YKL Indonesia memfokuskan diri pada isu pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan mendasarkan aktivitasnya pada visi: “Terwujudnya spirit environmentalisme”

Suatu komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah dan para pihak pemegang kepentingan (stakeholders) lainnya terhadap pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan lautan secara lestari dan bijaksana, berdasarkan norma-norma ilmiah

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban:

- Meneliti dan mengembangkan konsep-konsep keilmuan baik praktis maupun teoritis, serta melakukan kajian ilmiah yang

berhubungan dengan masalah pengelolaan sumberdaya dan lingkungan di daerah kepulauan kecil, pesisir dan lautan.

- Menyebarluaskan hasil-hasil kajian ilmiah serta penelitian dan pengembangan keilmuan yang menunjang usaha-usaha konservasi dan rehabilitasi lingkungan di daerah kepulauan kecil, pesisir dan lautan kepada masyarakat umum.
- Mengembangkan pusat basis data mengembangkan pusat basis data yang menunjang konservasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan kecil. Mengembangkan, memperkenalkan dan menerapkan teknologi alternatif ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan kecil.
- Melakukan gerakan peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran kritis, kampanye publik, serta penguatan kelembagaan lokal bagi masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan kecil.
- Melakukan kerjasama dan mengembangkan jaringan baik dengan sesama organisasi non pemerintah, kelompok swadaya masyarakat (KSM), pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, pengusaha sektor swasta, lembaga

dan/atau individu donor/penyandang dana, sepanjang tidak bertentangan dengan visi YKL Indonesia.

- Memberikan layanan profesional dan asistensi teknis kepada kelompok swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pemerintahan, yang menunjang konservasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan kecil.
- Mendorong adanya kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah kepulauan kecil, pesisir dan lautan yang terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan.

B. *Governance Collaboration* dalam Penerapan *Blue Economy* dalam Sektor Maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

a. *Face to face to dialogue* (Dialog Antar-Muka)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi atau sebagai jantung kolaborasi. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe yaitu persepsi organisasi yang memandang adanya sisi buruk organisasi lain) dan mampu meningkatkan rasa hormat antar organisasi.

Komunikasi dan pertukaran informasi sangat diperlukan. Kelancaran petukaran informasi merupakan bagian dari proses kolaborasi sehingga dapat mendukung keberhasilan kolaborasi. Maka dari itu komunikasi yang baik antar organisasi sangatlah penting karena apabila komunikasi sudah berjalan dengan baik maka seluruh informasi yang disampaikan cepat

sampai kepada semua aktor yang terlibat.

Dalam hal ini untuk mengukur *face to face to dialogue* (dialog antar-muka) kolaborasi organisasi pemerintah, non pemerintah dan pihak swasta dalam penerapan ekonomi biru, dibutuhkan indikator yaitu sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi yang digunakan oleh pemerintah yang terlibat lebih bersifat formal seperti pertemuan atau rapat-rapat dan komunikasi secara tidak langsung seperti komunikasi melalui teknologi yang dilakukan oleh organisasi yang berkolaborasi untuk membahas bagaimana penerapan ekonomi biru melalui pemberdayaan masyarakat di bidang rehabilitasi, pariwisata, UMKM, seperti memberikan bantuan alat tangkap ikan, pelatihan UMKM, pelatihan selam dan pelatihan keterampilan lain untuk selanjutnya diberikan bantuan peralatan sesuai dengan pelatihan yang telah diterima agar dapat menunjang perekonomiannya, sedangkan untuk pelayanan pemerintah dan LSM lebih berfokus pada fasilitator. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan yang bernama AA selaku Camat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dijumpai peneliti diruangnya yang sedang sibuk persiapan untuk pergi melakukan silaturahmi kepada warga rw 2 kelurahan barrang lompo, beliau berpendapat:

“Kami selaku pemerintah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ini sebagai fasilitator dalam hal Kolaborasi untuk bagaimana Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bisa lebih baik lagi. Apa lagi dalam hal pemberdayaan di sektor ekonomi. (Hasil wawancara oleh FR pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 jam 09. 53 wita)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Camat Kepulauan Sangkarrang dijelaskan bahwa kolaborasi dalam penerapan ekonomi biru secara *face to face to dialalogue* (dialog antar-muka) dalam hal kolaborasi bersifat aktif menyampaikan informasi dan transparan terhadap apa yang telah dilakukan.

Hal senada juga diungkapkan oleh SH selaku ketua Sangkarrang Ocean Dive (SOD) di Kecamatan Kepulauan sangkarrang yang berhasil ditemui peneliti pada saat ingin melakukan persiapan monitoring terumbu karang dan mengatakan bahwa:

“Saya sebagai ketua sangat berhubungan baik antar semua instansi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru bukan hanya dari instansi pemerintah tetapi bebrapa kali juga kolaborasi dengan pihak swasta dengan bentuk kegiatan rehabilitas terumbu karang dan serta aksi bersih pantai dan laut” (*hasil wawancara oleh pada hari kamis tanggal 3 januari 2024 pukul (16. 13 wita)*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua Sangkarrang Ocean Dive (SOD) menjelaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam penerapan ekonomi biru dari segi dialog Antar-muka sangat dominan dan telah terealisasi dengan efektif meskipun tidak adanya perjanjian yang mengatur sebelumnya.

Selain itu, argumentasi yang sama telah diungkapkan informan yang berinisial ID selaku direktur eksekutif yayasan konservasi lingkungan (YKL) indonesia terkait dengan *Face to Face to Dialogue* (Dialog Antar-Muka) yaitu:

“aspek komunikasi sangatlah penting dalam berkolaborasi apa lagi dengan pemerintah. YKL tidak pernah melakukan kegiatan bersama

masyarakat tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai elemen terkhusus pemerintah, kami juga beberapa kali melakukan kegiatan positif di wilayah kepulauan sangkarrang mengingat daerah tersebut sangat membutuhkan. ” (Hasil wawancara oleh FR pada hari Kamis tanggal 4 Januari jam 20.10 wita).

Informan di atas selaku pihak swasta yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dalam penerapan ekonomi biru berpendapat bahwa *face to face to dialogue* (dialog antar – muka) dalam hal ini terkait komunikasi yang dilakukan dengan berbagai lembaga yang terlibat sangat dibutuhkan karena melalui rapat dan pertemuan dapat berkomunikasi dengan baik dalam penerapan ekonomi biru.

Dari penjelasan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

b) Musyawarah

Dalam penerapan ekonomi biru maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar para lembaga yang berkolaborasi seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan ekonomi biru dengan melibatkan para lembaga secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan yang berinisial SH selaku ketua SOD Sangkarrang mengatakan bahwa :

“Setiap ada masalah-masalah yang terjadi mengenai kemaritiman yang mengancam ekosistem laut. kami sebagai penggerak dalam hal ini langsung mengadakan musyawarah dengan organisasi lain seperti pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, dinas Kelautan dan

perikanan, LSM, pihak swasta, pihak kepolisian atau keamanan tokoh masyarakat. , kemudian kita membahas apa pendapat dari masing-masing pihak untuk memberikan solusinya” (*Hasil wawancara oleh FR padahari kamis tanggal 5 januari 2024 pukul 16. 13 wita*)

Informan di atas mengemukakan bahwa dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim dilakukan musyawarah oleh semua organisasi yang terlibat dan tentunya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh berbagai kalangan. Hal yang senada pun telah diungkapkan oleh informan yang berinisial ID sebagai direktur eksekutif YKL Indonesia yang mengatakan

“Setiap instansi mempunyai ranah masing -masing YKL indonesia sejak dari di mulainya program telah menjalin komunikasi berdiskusi (musyawarah) terkait capaian apa yang menjadi target bersama. YKL indonesia menyadari bahwa dengan berkolaborasi program akan berjalan dengan baik. ” (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 6 januari 2024 pukul 20. 20*)

Selanjutnya, pernyataan yang sama juga dikatakan oleh salah satu informan yang berinisial IM selaku anggota SOD sangkarrang yang mengemukakan bahwa :

“Dari awal sebelum dilakukan musyawarah dengan pemerintah Desa dan instansi yang terlibat saya memberi masukan kepada pemerintah Kecamatan agar melakukan perhatian penuh terhadap ekosistem laut agar ekosistem terjaga arna dengan terjaganya ekosistem khususnya di laut yakin dan percaya nelayan yang menggantungkan dirinya kepada hasil laut akan merasakan dampak positifnya dan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri, (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 jam 1 6 . 20 wita*).

Dari hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktor yang melakukan kolaborasi dalam penerapan ekonomi biru

terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama.

c). Keterbukaan

Keterbukaan membutuhkan rasa saling memahami dan mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dengan menyampaikan secara transparan dan terbuka kepada semua lembaga baik lembaga pemerintah maupun swasta. tanpa pandang bulu. Sikap saling menghormati dan menghargai tidak menghalangi masing-masing untuk menyampaikan informasi dan mengemukakan pendapatnya secara terbuka.

Individu, instansi atau organisasi yang menjalin kolaborasi harus selalu terbuka dalam menyampaikan informasi atau bertukar pendapat dengan semua organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut pemerintah Kecamatan kepulauan Sangkarrang yang berinisial AA selaku Camat Kepulauan Sangkarrang berpendapat bahwa keterbukaan informasi yang terjadi dalam kolaborasi ini adalah:

“Kolaborasi antara kami dengan beberapa instansi dan organisasi selalu terbuka dalam menyampaikan informasi begitupun sebaliknya, pak wali selalu selalu menyampaikan kepada kami apa permasalahan yang terjadi dilapangan, serta menyampaikan segala keluhan dari masyarakat, kemudian kami memberi saran atau solusi terhadap masalah tersebut” (*Hasil wawancara oleh IM pada hari tanggal 3 januari jam 09. 53 wita*)

Berdasarkan dari hasil wawancara Camat Kepulauan Sangkarrang menjelaskan bahwa pertukaran informasi secara terbuka dapat membantu pemerintah dan organisasi atau instansi yang berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan secara menyeluruh.

Selanjutnya, argumen yang sama juga diungkapkan oleh MA selaku masyarakat setempat yang merupakan nelayan mengatakan :

“Saya pernah menerima panggilan untuk menghadiri musyawarah untuk membahas tentang pengembangan UMKM dari hasil laut dan pemerintah Desa juga terbuka kepada masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut perekonomian dan peraturan kelautan” (*Hasil wawancara oleh SP pada hari jumattanggal 6 januari 2024 jam 10. 30 wita*)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara informan dikemukakan bahwa pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru di sektor maritim telah menyampaikan informasi secara terbuka dengan masyarakat ataupun dengan organisasi yang lain.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Saling percaya terhadap organisasi dan percaya akan sumber daya yang dimiliki mampu menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Kepercayaan harus ada sejak awal sampai berakhirnya kegiatan. Dengan adanya sikap saling membangun kepercayaan (*trust building*) sehingga akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara semua pihak yang berkolaborasi. Dalam membangun kepercayaan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur

proses kolaborasi yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Empati

Kemampuan setiap organisasi untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku organisasi lain (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pemberdayaan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu informan yang bergerak sebagai actor organisasi dalam penerapan ekonomi biru yaitu:

Menurut informan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang berinisial LK selaku Staff perekonomian pembangunan dan sosial mengatakan bahwa;

Pemerintah kecamatan Kepulauan Sangkarrang melalui Kelurahan Barrang lombo dan Sangkarrang Oceaan Dive kami selalu saling membantu satu sama lain dan mendukung program yang di laksanakan meskipun pada dasarnya kami tidak ada program kerja secara terikat yang disepakati seperti SOD yang membantu membuat apartemen ikan yang membantu pemancing ikan dan cumi sebagai tempat mereka memancing ikan dan cumi. *(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 3 2024 jam 09. 58 wita)*

Berdasarkan dari pernyataan di atas diungkapkan bahwa sikap kepekaan antar aktor dalam penerapan ekonomi biru saling mendukung oleh semua aktor yang berkolaborasi.

Hasil wawancara dari informan yang lain yang berinisial IM selaku anggota SOD sangkarrang yang sedang melakukan kegiatan di Pulau Barrang Lombo salah satu pulau yang ada di Kecamatan

Kepulauan Sangkarrang menyampaikan;

Setiap kali kami berkegiatan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tentang pengembangan ekonomi biru pemerintah setempat juga sering turut andil dalam membantu entah itu melalui peminjaman fasilitas pemerintah dan perizinan selalunya ada yang membantu kami baik itu dari kelurahan barrang lombo maupun dari Kelurahan lain Yang ada di Kecamatan sangkarrang, apabila kami membutuhkan bantuan mereka langsung membantu begitupun sebaliknya ada umpan balik yang kami terima. *(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 jam 16. 30 wita)*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial IM dapat disimpulkan bahwa terdapat timbal balik yang dilakukan oleh semua lembaga, organisasi dan swasta yang berkolaborasi dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim.

2. Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan organisasi yaitu dapat difokuskan, seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang diberikan oleh organisasi yang berkolaborasi dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim. Begitu juga pendapat dari informan yang berinisial selaku Ketua SOD sangkarrang yang mengemukakan agrumennya bahwa:

“Kami sangat berpegang teguh dengan yang namanya kepercayaan ada hal yang kami pegang terkait kepercayaan yaitu harus transparan, tidak berbelit-belit, dan pastinya harus jujur ” *(Hasil wawancara oleh AT pada tanggal 5 januari 2024 pukul 16. 30 wita).*

Informan SH di atas selaku ketua SOD Sangkarrang yang bergerak dan berpengaruh penting terhadap konservasi lingkungan

terkhusus di bidang rehabilitas terumbu karang di pesisir Pulau Barrang Lompo berpendapat bahwa kepercayaan harus di miliki dan ditanamkan pada setiap organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim dan tentunya harus transparan, tidak mengedepankan banyak teori daripada kerja nyata, serta jujur dengan apa yang mereka lakukan dan setiap apa yang mereka sampaikan.

Hal senada yang di sampaikan oleh informan yang berinisial ID selakudirektur eksekutif YKL indonesia, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kepercayaan itu pasti ada, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan LSM, ataupun masyarakat, kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan satu sama lain pihak yang berkolaborasi. Saling membuka hati, pikiran dan niatan bersama untuk memberikan positif tanpa adanya penghakiman menjadi landasan kami dalam menjalin kolaborasi”. *(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 6 januari 2024 jam 20. 30 wita).*

Informan di atas mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap semua organisasi telah terjalin dengan baik mulai dari sejak awal berkegiatan dengan pemerintah sampai sekarang kegiatan atau program telah berjalan.

3. Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap organisasi yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi lembaga pemerintah, non-pemerintah dan swasta yang terlibat kolaborasi dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Berikut ini pendapat informan yang berinisial SH selaku ketua SOD Sangkarrang mengatakan bahwa :

“Kami selalu membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan emosional terhadap semua organisasi yang terlibat karena kami mengurus tugas kami masing-masing, kalau kami tidak percaya terhadap semua elemen yang bekerja keras dalam konservasi lingkungan pesisir tidak mungkin lingkungan pesisir akan mengalami pertumbuhan ini biar lebih diperhatikan oleh pemerintah seperti saat ini” (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 jam 16. 35 wita*).

Hasil wawancara dengan informan di atas mengatakan bahwa konservasi lingkungan selalu mengedepankan sikap saling percaya terhadap semua yang terlibat dalam kolaborasi.

Pendapat informan yang berinisial HS selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengatakan

sejauh ini pihak yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru terkhususnya dalam bidang konservasi lingkungan telah banyak membantu pemerintah kelurahan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di kelurahan kami seperti berkurangnya hasil tangkap nelayan, dan juga kami sebagai masyarakat disini mulai paham bahwa memang konservasi lingkungan harus di jaga dan harusnya memiliki perhatian lebih dari pemerintah karena sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 jam 16. 50 wita*).

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa informan yang berinisial HS selaku tokoh masyarakat setempat percaya akan semua lembaga yang terlibat dalam kolaborasi penerapan ekonomi biru khususnya dalam bidang konservasi lingkungan. hal ini dibuktikan bahwa masyarakat mulai sadar bahwa konservasi lingkungan sangatlah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi dengan begitu dapat ditarik

kesimpulan bahwa sudah terdapat aspek *trust building* atau adanya saling percaya antar sesama lembaga yang berkolaborasi dalam penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim.

c. *Commitmn to Process* (Komitmen pada Kolaborasi)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Masing-masing aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama.

1. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam penerapan ekonomi biru. Informan dari pemerintah yang berinisial AA selaku camat Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar mengatakan:

Setiap kami melakukan kolaborasi dengan LSM maupun swasta kami sering melakukan musyawarah secara terbuka agar supaya tidak ada yang di beratkan satu sama lain. kemarin dalam kegiatan bersama CDK kami melakukan kesepakatan bersama dan mempertanggung jawabkan apa yang telah di sepakati pada saat musyawarah. (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 3 januari 2024 jam 11. 18 wita*).

Pendapat informan di atas mengatakan bahwa komitmen ada karena ada tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan terkait

penerapan ekonomi biru di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Ketua SOD Sangkarrang juga menjelaskan tugasnya dalam kolaborasi, beliau memaparkan bahwa:

SOD sangkarrang dalam menjalankan program sering melakukan musyawarah bersama anggota terlebih dulu sebelum bersama pihak yang berkolaborasi untuk menentukan apa yang nanti akan di sepakati supaya nantinya unsur kesetaraan terjalin dalam kolaborasi . dan apapun hasil kesepakatan dalam kolaborasi kami pertanggungjawabkan setelahnya”. ” (Hasil wawancara oleh FR pada 5 januari 2024 pukul 17. 23 wita).

Hal serupa di jelaskan oleh direktur eksekutif YKL bahwa yang berkolaborasi telah memiliki tugas masing-masing

“dalam berkolaborasi biasanya kami membagi tugas sesuai hasil kesepakatan bersama dalam bermusyawarah, ada berapa program kegiatan yang kami dari YKL sebagai eksekutr langsung di lapangan seperti yang kami kerjakan seperti program yang kami sebut (PROTEKSIGAMA) program penguatan ekonomi dan konservasi gurita bersama masyarakat, pulau langkai Kelurahan Barrang Caddi”. (Hasil wawancara oleh AR pada tanggal 6 januari 2024 jam 20. 15 wita).

Informan diatas menjelaskan bahwa komitmen didalam penerapan ekonomi biru sangat dominan dalam melaksanakan tugas masing-masing, berangkat dari hasil yang disepakati sebelumnya, keyakinan yang membuat mampu komitmen terhadap apa yang dilakukan.

2. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen

dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan terhadap penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan Kepulauan sangkarrang Kota Makassar, sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi.

Dalam penerapan ekonomi biru khususnya dalam bidang konservasi yang dilakukan oleh SOD sangkarrang. banyak yang dirasakan masyarakat. hal ini diungkapkan oleh informan yang berinisial SH selaku ketua SOD sangkarrang:

Alhamdulillah setelah kami melakukan kegiatan kolaborasi bersama pihak swasta dan pemerintah kami selalu mendapatkan apresiasi dan kami jua ketika membuat kegiatan pasti akan mengapresiasi entah itu dengan bentuk narasi yang kami buat untuk di upload di sosmed maupun akrilik untuk biasanya sebagai kenang kenangan(*Hasil wawancara oleh FR pada hari kamis tanggal 5 januari 2024 16. 58 wita*).

Informan di atas mengatakan bahwa dalam penerapan ekonomi biru sering mendapat berbagai apresiasi dari pemerintah.

3. Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari pemberdayaan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim di kecamatan kepulauan sangkarang Kota makassar. Menurut LK selaku staff dalam bidang perekonomian pembangunan dan sosial mengatakan bahwa :

“ada beberapa bantuan yag biasanya diberikan oleh CDK

Mamminasata melalui pemerintah sangkarrang yang telah di berikan kepada masyarakat Kecamatan Sangkarrang seperti apartemen fish dan juga speed boad kepada masyarakat yang merupakan salah satu program untuk peningkatan hasil tangkap nelayan serta mengevaluasi bagaimana perkembangan kegiatan ini kami dibantu oleh pemerintah kelurahan dan beberapa organisasi dan swasta. *(Hasil wawancara oleh FR tanggal 3 januari 2024 jam 10. 45 wita).*

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa pemerintah Kecamatan sangkarrang berperan penting dalam penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim. Hal yang senada juga diutarakan oleh informan yang berinisial IM selaku anggota dari SOD sangkarrang mengatakan:

“Sebenarnya kami merupakan komunitas yang memiliki dana tersendiri dalam melakukan konservasi lingkungan khususnya transplantasi terumbu karang. tetapi kami tetap berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM agar masalah lingkungan terkhusus terumbu karang yang rusak akibat pengeboman dan bus ikan akan segera teratasi, kasihan nelayan kecil yang memancing hasil tangkapnya kian merosot, semoga penerapan ekonomi biru ini dapat lebih baik lagi kedepannya ”*(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 jam 10. 01).*

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa SOD sangkarrang hanyalah sebagai fasilitator dalam penerapan ekonomi biru.

Hasil wawancara dengan informan terkait dengan monitoring penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diungkapkan oleh ID sebagai direktur eksekutif yayasan konservasi lingkungan (YKL) indonesia, mengatakan bahwa:

“kami dari YKL indonesia mengadakan rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan dari program kegiatan yang kami lakukan, apakah ada hasil yang baik atau bagaimana,

alhamdulillah selama ini kami dari YKL Indonesia selalu kami libatkan maupun dalam publikasi . laporan program khususnya capaian selalu kami laporkan melalui publikasi. (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 6 Januari 2024 jam 20. 20 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang diutarakan oleh informan yang berinisial ID di atas dikatakan bahwa di setiap kegiatan program khususnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang melakukan rapat mengevaluasi bagaimana perkembangan terhadap penerapan ekonomi biru.

Hal senada diungkapkan oleh RH selaku nelayan yang ada di Kelurahan Barrang Lompo mengatakan bahwa:

Saya pribadi merasa bersyukur sekali karena kami sudah lebih diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya karena saya dan beberapa nelayan lainnya sangat merasakan adanya perkembangan dari perhatian pemerintah karena ada juga lembaga yang selalu datang mempertanyakan bagaimana kondisi kami di sini. (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 27 Desember 2023 Pukul 17. 05 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas yang berinisial RH mengatakan bahwa perkembangan dari pemberdayaan penyandang disabilitas karena adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan LSM yang bekerjasama dalam mengevaluasi perkembangan dari penerapan ekonomi biru tersebut.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common*

objectives(obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama).

1. Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pemberdayaan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama organisasi yang terlibat. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

Menurut informan dari pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang berinisial AA selaku Camat Kepulauan Sangkarrang mengatakan bahwa :

“Kami tidak punya visi dan misi yang ada hanya visi dan misi pemerintah kota yang kami terapkan. Dan kami menjalankan visi dan misi sesuai dengan visi dan misi, begitupun dengan organisasi atau lembaga lainnya dan kami selalu berfikir bahwa apa saja yang dapat kami lakukan agar ekonomi masyarakat khususnya dalam bidang kelautan ini karna kita adalah wilayah kepulauan dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuannya adalah untuk memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sangkarrang itu sendiri. (Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 3 januari 2024 jam 10.15 wita).

Informan di atas mengemukakan bahwa pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang berada di bawah wilayah administrasi Kota Makassar dalam penerapan ekonomi biru mereka pahan dengan tugas mereka.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim, informan yang berinisial SH selaku ketua SOD sangkarrang mengatakan bahwa:

Visi dan misi secara umum terkait dengan ekonomi biru ini agar supaya terciptanya lingkungan yang lestari sehingga mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan. Dan itu sangat penting di daerah sini karna biasa kurang pemahaman masyarakat batas dampak bagaimana lingkungan yang kurang sehat di wilayah kepulauan. (Hasil wawancara oleh FR tanggal 5 januari 2024 pukul 17. 13 wita).

Sedangkan menurut informan yang berisial SH selaku ketua SOD sangkarrang bahwa visi dan misi yang diterapkan yaitu untuk terciptanya lingkungan yang lestari dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat umum. Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial ID selaku direktur eksekutif YKL indonesia terkait pemahaman bersama dalam penerapan *blue economy*, yang mengatakan bahwa

“YKL indonesia merupakan organisasi Non-pemerintah yang berorientasi pada konservasi ekosistem laut serta pemberdayaan pulau-pulau kecil dan laut hal yang mendasari kami mengingat kondisi pesisir laut yang ada di daerah pesisir itu memprihatinkan . (Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 6 januari 2024 jam 21. 23 wita).

Berdasarkan dengan apa yang dipaparkan informan di atas mengatakan bahwa kesamaan visi misi berlandaskan dari kondisi wilayah pesisir dan laut cukup memprihatinkan.

2. Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi dalam penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim Di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota makassar. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah kolaborasi dilaksanakan.

Camat kepulauan sangkarrang yang berinisial Aaterkait dengan hal ini berpendapat bahwa:

“kami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bagaimana ekonomi masyarakat mengalami peningkatan khususnya dengan cata tentunya bukan merusak lingkungan, kami juga selalu berkolaborasi dengan organisasi maupun swasta yang memang menegrti akan hal ini. *(Hasil wawancara oleh FR pada 3 januari 2024 pukul 10. 19 wita).*

Informan di atas menjelaskan hal yang sama yaitu tuuan untuk peningkatan ekonomi sekaligus menjaa kelestarian lingkungan dengan terlibat dalam penerapan eknomi biru di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota makassar.

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan diatas tujuan secara eksternal yaitu untuk meningkatkan ekonomi tanpa membuat lingkungan pesisir dan laut menjadi rusak.

3. obyektivitas umum

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama organisasi dalam melakukan berkolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih dalam terkait penerapan ekonomi biru sektor maritim.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalampenerapan ekonomi biru sektor maritim, informan yang beriinisial SH selaku ketua SOD sangkarrang mengatakan bahwa:

“Tujuan kami ingin agar lingkungan pesisir terkhusus terumbu karang agar selalu tetap lestari, sehingga dapat menarik berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya, sehingga dapat membantu hasil tangkap nelayan kecil yang bergantung kepada hasil tangkap yang ada di pesisir pulau saja tanpa jauh keluar mencari ikan di laut yang luas. (Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 pukul 17. 30 wita).

Oleh karena itu terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan yang berinisial SH di atas bahwa SOD sangkarrang memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan ekonomi biru.

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial ID selaku direktur eksekutif terkait pemahaman bersama dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim:

“Fokus kami hanya pada konservasi ekosistem pesisir dan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. kami berusaha menyadarkan masyarakat akan dampak dari kerusakan ekosistem laut dengan konsep keilmuan yang kami telah pelajari. (Hasil wawancara oleh AD pada tanggal 6 januari 2024 pukul 20, 25 wita).

Informan AD di atas mengemukakan bahwa dalam penerapan ekonomi biru YKL Indonesia memfokuskan kepada konservasi ekosistem laut dan pesisir dengan dasar konsep keilmuan yang telah dipelajari dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

e. *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil).

Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang berinisial SH yang mengatakan bahwa :

“Hasil yang dirasakan dari adanya UU nomor 37 tahun 2007 tentang barang siapa dengangan sengaja mengambil, menambang, atau merusak terumbu karang di denda minimal Rp 2 miliar dan maksimal 10 Miliar atau pidana penjara 2 tahun atau maksimal 10 tahun. Ini membuat masyarakat menjadi takut karna sering di sosialisasikan oleh pemerintah dan organisasi untuk selalu menjaga ekosistem laut. *(Hasil wawancara oleh FR pada hari selasa tanggal 5 januari 2024 jam 17. 30 wita).*

Dari pernyataan informan SH di atas di kemukakan bahwa dengan adanya bantuan dan sosialiasi dari, pemerintah, LSM dan lainnya serta hadirnya UU nomor 37 tahun 2007 lebih banyak menimbulkan hal positif daripada hal negatifnya, hal ini dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh informan di atas.

Pendapat lain yang disampaikan oleh informan yang berinisial HZ selaku tokoh masyarakat di Pulau Barrang Lompo terkait bagaimana penerapan ekonomi biru bahwasanya masyarakat sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut dalam menunjang pendapatan nelayan sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara bahwa:

“Setelah adanya kelompok masyarakat seperti salah satunya SOD sangkarrang yang berada di pulau barrang lompo ini, kami selaku masyarakat menjadi lebih paham betapa pentingnya pelestarian ekosistem laut ini tentunya untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan kecil yang ada di pulau barrang lompo ini”. *(Hasil wawancara oleh FR pada hari sabtutanggal 28 Desember 2023 jam 10. 30 wita).*

Dari pendapat di atas dikemukakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas karena mereka

adalah orang-orang yang harus didukung dalam memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Blue Ekonomi dalam Sektor Maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

1. Faktor Pendukung dalam Penerapan Blue Economy Sektor Maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Makassar

1) Kebijakan

Kebijakan tentang konservasi ekosistem laut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang barang siapa dengangan sengaja mengambil, menambang, atau merusak terumbu karang di denda minimal Rp 2 miliar dan maksimal 10 Miliar atau pidana penjara 2 tahun atau maksimal 10 tahun. UU ini menjadi salah satu faktor pendukung diberlakukannya penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan sangkarrang Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua SOD Sangkarrang sebagai berikut:

“ketika kita berbicara mengenai kebijakan maka memang benar itu menjadi salah satu faktor pendukung jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuannya di luar menjaga kelestarian lingkungan juga membuat ekonomi nelayan kecil yang menggantungkan dirinya pada hasil tangkap yang berada di pesisir pulau saja” (*hasil wawancara oleh FR pada tanggal 5 januari 2024 pukul 17. 26 wita*)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki harapan besar agar pemerintah mampu merealisasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Karena pemerintah memiliki peran penting

dalam menjaga lingkungan. Wawancara lain dilakukan dengan camat Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang sependapat dengan ketua SOD sangkarrang yang mengatakan bahwa:

“kebijakan bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan ekonomi biru ini yang dimana ada UU tentang perusakan ekosistem laut” (*Hasil wawancara oleh SN pada tanggal 3 januari 2024 jam 10.50*)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dan lingkungan. Pemerintah diharapkan mampu lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tujuan agar ekonomi masyarakat meningkat tanpa merusak ekosistem yang ada di laut.

b. Pemberian Bantuan dan Pelatihan

Pemberian bantuan dan pelatihan tentunya bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk mensosialisasikan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan sangkarrang Kota Makassar. Karena dengan adanya bantuan pelatihan beserta dengan peralatan keterampilan dapat memudahkan masyarakat, organisasi untuk lebih mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mampu lebih kreatif dan semangat untuk meningkatkan usaha yang mereka jalankan. Hal tersebut dibenarkan oleh AA selaku Kcamatan Kepulauan sangkarrang yang menyatakan bahwa:

“salah satu pelatihan yang ada dari Dinas pemuda dan olahraga kota makassar berikan kepada pemuda yang tergabung dalam LSM yaitu pelatihan life skill tentunya dengan sertifikasi internasional untuk para penyelam agar dapat terus mengembangkan skillnya untuk bagaimana membantu dalam pelestarian terumbu karang yang ada di wilayah pesisir. ada bantuan juga untuk kelompok pengawas yang ada di kecamatan sangkarrang dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk

mengawasi wilayah pesisir dan laut dan juga dapat di pakai oleh masyarakat dalam hal hal yang berkaitan tentang kemasyarakatan. ” (wawancara dengan FR, pada 7 januari 2024)

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa dengan pemberian fasilitas dan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian wawancara lainnya dengan salah satu anggota kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sangkarrang yang juga termasuk salah satu peserta platihan dan juga pengguna peralatan tersebut yang mengatakan bahwa:

“benar pemerintah telah memberikan kami bantuan berupa satu buah speed dan juga megadakan sertifikasi pelatihan *life skill* , jadi kami bisa menggunakannya untuk mengawasi pelanggar pelanggar yang berpotensi merusak area pesisir dan laut. serta pelatihan life skill juga sangat penting karna dengan adanya sertifikasi tersebut kami merasa paham akan hal ini” (Hasil wawancara oleh AD pada hari sabtu tanggal 29 desmber 2023 pukul 16. 13 wita).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberian bantuan peralatan dapat mendukung serta mengembangkan penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang. Pemerintah mampu menunjukkan perhatian terhadap kehidupan masyarakat. Dengan bantuan peralatan dan keterampilan tersebut mampu membangun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.

b) Faktor Penghambat penerapan ekonomi biru di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat yang dmaksud dalam hal ini adalah tentang bagaimana dampak yang di timbulkan akibat rusaknya

ekosistem laut dan pesisir yang juga berdampak pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan Ketua SOD Sangkarrang yang mengatakan bahwa :

“sejauh ini masyarakat pada umumnya masih menganggap kerusakan lingkungan pesisir dan laut hal yang biasa terjadi, ini salah satu yang menjadi masalah kita yang bergerak dalam bidang permasalahan lingkungan pesisir dan laut. Tetapi kita akan terus mensosialisasikan bersama pemerintah dan mengawasi ketat para pelanggar”(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 16. 13 wita).

Penerapan ekonomi biru khususnya dalam bidang pelestarian lingkungan untuk menunjang ekonomi dari hasil tangkap nelayan menengah kebawah juga memiliki permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan hal pelestarian lingkungan. akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kerusakan ekosistem laut dan pesisir khususnya pada terumbu karang menjadikan masyarakat masih melakukan pelanggaran. Lanjut, komentar dari salah satu nelayan yang pernah di kenakan teguran, beliau mengatakan:

“benar, kemarin saya kena teguran terlebih dahulu, karna memang saya kurang paham tentang aturan tentang penangkapan ikan dengan cara bius, karna itu cukup efektif bagi saya untuk menangkap ikan besar yang ada di bawah karang. tetapi alhamdulillah setelah di tegur saya jadi paham dampaknya memang luar biasa karna karang langsung mati jika terkena cairan kimia bius itu”(Hasil wawancara oleh SM pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 10. 13 wita).

Pemerintah harus memberikan sosialisasi yang menyeluruh tentang bahaya kerusakan lingkungan. agar mereka masyarakat paham bahaya akan kerusakan lingkungan karna juga akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri. penerapan ekonomi biru pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Oleh

karena itu, semua unsur tersebut berperan aktif dalam mewujudkannya. Dengan memberikan pemahaman akan dampak yang terjadi, maka kelestarian lingkungan pesisir dan laut menjadi terjamin dan terlindungi, Sehingga dapat menjadi ekosistem yang lebih terjaga yang dapat meningkatkan ekonomi secara sehat.

Proses penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang telah sadar akan kerusakan lingkungan pesisir. Sehingga dalam proses penerapan ekonomi biru tidak hanya sampai pada pemberian teguran saja tetapi pemerintah dalam hal ini perlu turut mengambil peran penting dalam mensosialisasikan dampak akibat kerusakan lingkungan

2) Anggaran

Anggaran yang disediakan pemerintah dalam penerapan ekonomi biru masih dirasakan sangat kurang. Karena dengan anggaran tersebut setiap rencana kegiatan akan mudah terlaksana dan mampu membantu kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Berikut hasil wawancara dengan Camat Kepulauan sangkarrang.

“sebenarnya yang menjadi kewenangan menyeluruh tentang kelautan adalah di limpahkan ke provinsi. jumlah anggaran menjadi salah satu penghambat jalannya pemberdayaan dan kegiatan konservasi, biasanya kegiatan pemberdayaan dan konservasi sudah direncanakan tapi rencana kegiatan pemberdayaan tersebut harus disesuaikan dengan kas bagian keuangan karena keterbatasan anggarannya” *(Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 3 januari 2024 jam 10. 55 wita).*

Hal serupa di ungkapkan oleh SH selaku ketua SOD Sangkarrang, beliau mengatakan:

“harusnya memang ada anggaran tersendiri akan hal ini karna ini merupakan hal yang urgent, memang sekarang belum keras di rasakan dampaknya tapi beberapa tahun kedepan pasti akan di rasakan.” (*Hasil wawancara oleh FR pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 13. 03 wita*).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam hal anggaran pemerintah masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memperhitungkan kembali anggaranyang diberikan guna untuk pelestarian lingkungan ini. Kurangnya anggaran dari pemerintah akan mempersulit untuk menjalankan proses pelestarian lingkungan.

D. Pembahasan

Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepulauan Sangkarrang Ocean Dive (SOD), Yayasan konservasi laut (YKL) indonesia dalam penerapan *blue economy* dalam sektor maritim dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan dan kelautan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang proses kolaborasi pemerintah, LSM dan swasta terhadap penerapan ekonomi biru sesuai dengan UU NO 37 tahun 2007, dan peneliti lebih berfokus pelestarian ekosistem laut dan untuk mengetahui proses kolaborasi aktor dalam penerapan ekonomi biru peneliti menggunakan konsep kolaborasi yaitu terdapat beberapa komponen dari proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai penunjang keberhasilan kolaborasi aktor dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim demi tercapainya *Good Collaboration Governance*. adapun hasil pembahasannya antara lain sebagai berikut:

1) Dialog antar-muka (*Face to face to dialogue*) dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim, yang dimaksud adalah membangun komunikasi secara terbuka yakni melakukan pertemuan formal ataupun non formal saling menerima pendapat tanpa melihat besaran dan kekuatan merasa seimbang satu sama lain dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Adapun sub fokus dari dialog antar muka yang menjadi alat ukur dalam proses kolaborasi diantaranya:

a. Komunikasi

Aspek komunikasi yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini terkait dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang adalah cara penyampaian informasi dengan *content* (isi) yang harus jelas dan mendapat respon secara timbal balik oleh setiap lembaga. Dalam hal ini dapat diukur dari setiap pertemuan yang diadakan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada pihak swasta dan masyarakat mengenai kebutuhan dalam pembangunan serta komunikasi secara terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan dalam penerapan ekonomi biru sebagai wujud partisipasi pihak swasta dan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa organisasi yang berkolaborasi saling berkomunikasi dengan baik karena adanya kewajiban dari tugas masing-masing organisasi yang mewajibkan mereka untuk melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan teknologi untuk membahas bagaimana penerapan

ekonomi biru. Komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti rapat-rapat yang dilaksanakan sebelum program kegiatan dilaksanakan, sehingga ketika ada masalah yang harus dibahas dan diselesaikan dan dicari solusi secara bersama-sama.

Agranoff dan McGuire (2012: 144-153) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen yang diantaranya komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor.

b. Musyawarah

Dalam penerapan blue ekonomi sektor maritim maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar lembaga yang berkolaborasi seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dengan melibatkan lembaga secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan para informan berpendapat bahwa musyawarah adalah hal yang penting untuk

dilakukan, namun sebelum semua organisasi yang terlibat melakukan musyawarah semua lembaga terlebih dahulu mengadakan musyawarah secara intrnal maupun melibatkan masyarakat yang terdampak. untuk membahas apa yang menjadi kesepakatan bersama.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Thomson, Perry, and Miller (2008) melalui Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi.

c. Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah memahami dan mengidentifikasi cara berbicara secara luwes dan bebas dalam menanggapi berbagai isu dan kendala yang dialami yang dilakukan secara berkala dan mendapat respon yang sifatnya timbal balik oleh organisasi baik dari organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada kaitannya dengan penerapan ekonomi biru sektor maritim di

kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berdampak negatif terhadap pembangunan.

Sifat saling terbuka antar sesama organisasi berdasarkan hasil wawancara diatas mengemukakan bahwa setiap organisasi yang terlibat saling terbuka terutama ketika ada informasi yang berhubungan dengan ekonomi biru, tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam kolaborasi karena setiap organisasi telah memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaannya.

Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul “*Collaboration Processes: Inside The Black Box*” berpendapat bahwa Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*). Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni:

- a) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit;
- b) jujur dalam negosiasi apapun;
- c) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan

yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummings dan Bromiley, 1993: 303).

- 2) Membangun Kepercayaan (*trust building*), yang dimaksud adalah membangun keterbukaan dan saling membantu menyelesaikan peroblem bagi masalah yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah dispakati. Adapun alat ukur yang digunakan dalam hal membangun kepercayaan (*trust building*) dalam proses kolaborasi diantaranya yaitu :

- a. Empati

Dasar dari sikap empati dalam penerapan ekonomi biru dalam sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang Kota Makassar merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku organisasi (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pemberdayaan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas.

Setiap organisasi yang terlibat dalam kolaborasi dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim harus menyadari kewajibannya masing-masing karena tugas telah diberikan secara baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap organisasi di bidangnya msing-masing dan setiap lembaga sangat menjaga tanggung jawab yang telah di berikan agar tidak timbul saling mencurigai sesame lembaga yang terlibat.

Menurut Roberts et al. (2016) dalam Dimensi Otonomi (*The*

Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension). Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey, 1991). Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

b. Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan organisasi yaitu dapat difokuskan pada seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang diberikan oleh organisasi yang berkolaborasi dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkrrang.

Kepercayaan yang diberikan setiap lembaga yang berkolaborasi sangat dijaga, sehingga ketika ada tugas yang mendesak organisasi harus tetap siap untuk menanganinya, sumbangsi dilakukan berdasarkan tugas

setiap lembaga.

Donahue, (dalam sudarmo, 2011) yang mengemukakan bahwa Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerjasama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi dalam menentukan/ mendefinisikan tujuan, menilai hasil menyebabkan perubahan dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/ pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan public yang lebih besar. Kedua, masing-masing institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan ddiantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

c. Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi setiap lembaga yang terlibat kolaborasi dalam penerapan ekonomi sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Hubungan emosial harus dibangun dengan baik karena itu sangat berpengaruh terhadap kinerja setiap organisasi yang terlibat, SOD

Sangkarrang dan pemerintah telah melakukan hubungan emosional dengan beberapa kali berkegiatan bersama. karena mereka berpendapat bahwa hubungan emosional yang baik dapat terbangun dengan adanya komunikasi yang baik, saling berbagi informasi dan saling menyelesaikan masalah secara bersama- sama.

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016) yang berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, pada poin keempat yaitu Karakteristik pribadi tertentu (*spesific personal characteristics*), Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan organisasi lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut.

- 3) Komitmen pada proses (*Commitmn to the process*), yang dimaksud adalah benar-benar konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya baik setelah dilakukan penerapan ekonomi biru sektor maritim meskipun dalam penerapannya hanya hasil kesepakatan bersama yang tidak mempunyai aturan baku yang disepakati oleh semua lembaga sebelumnya.

Dari beberapa pendapat infolrman diatas dapat dikatakan bahwa masing-masing organisasi sudah berkomitmen terhadap tugasnya masing-masing dimana tugas setiap lembaga yang berkolaborasi berkomitmen untuk mnjaga

hasil yang telah di sepakati setelah musyawarah atau rapat akan tetapi dari beberapa kolaborasi yang di laksanakan hanya ada beberapa surat perjanjian kesepakatan yang telah di tanda tangani secara bersama.

Dengan komitmen tersebut lebih ditunjukan kepada menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan pihak-pihak yang tanggungjawab atau yang membawahi mereka masing-masing. Adapun sub fokus penelitian dari komitmen yaitu:

a. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar lembaga yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang.

Pengakuan bersama dilakukan dalam wujud melaksanakan tugas yang telah diberikan dalam kolaborasi. Informan menjelaskan bahwa komitmen didalam penerapan ekonomi biru sangat dominan dalam melaksanakan tugas masing-masing, berangkat dari hasil yang disepakati sebelumnya, keyakinan yang membuat mampu komitmen terhadap apa yang dilakukan. Adanya pengakuan bersama terhadap tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan

antar aktor. Keinginan untuk melakukan Collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi. Maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi.

b. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan kegiatan kolaborasi sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi. Apresiasi yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan UU nomor 37 tahun 2007, agar ketika mengalami kendala dan masalah dalam penerapan ekonomi biru pihak yang berkolaborasi dan masyarakat memiliki payung hukum yang mampu membantu mereka dalam pemenuhan hak lingkungan.

Dijelaskan oleh Dwiyanto (2015), yang mengatakan bahwa kerjasama kolaboratif masing-masing organisasi diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama secara

berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat.

c. Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan pemberdayaan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sngkarrang Kota Makassar.

Monitoring dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam kolaborasi. Mereka yang bertugas melihat sejauh mana perkembangan dari pelestarian lingkungan untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan kemudian melaporkan kembali ke Dinas kelautan dan perikanan provinsi tentang perkembangan yang terjadi, sehingga instansi yang terkait dapat melihat bagaimana hasil rehabilitasi yang di lakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi sulawesi selatan melalui CDK.

Menurut Tag dan Masmanian (2008) mendefinisikan *collaborave governance* sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor

pengaturan organisasi lintas sector untuk menangani masalah kebijakan public yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sector public sendiri. Pengaturan ini ditangani dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antar entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sector public, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumberdaya masing-masing.

- 4) Pemahaman Bersama (*shared understanding*), yang dimaksud adalah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari penerapan ekonomi biru sektor maritim yaitu lebih memahami kebutuhan masyarakat dan lingkungan khususnya ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Pendapat dari informan diatas menjelaskan bahwa untuk visi dan misi setiap organisasi berbeda-beda dan tidak adanya visi misi yang disepakati secara bersama namun untuk tujuan setiap organisasi sama karena tujuanlah yang sangat penting untuk di capai, dimana tujuannya yaitu peningkatan arus ekonomi dengan memperhatikan ekosistem laut. sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun sub indikator dari pemahaman bersama yaitu:

- a. Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pembangunan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga

harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama para aktor. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

Adanya kesamaan visi dan misi dari kedua lembaga yang terlibat dalam kolaborasi yang berkolaborasi sehingga setiap lembaga saling mengerti dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan visi misi yang ada di lembaga masing-masing.

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. Dsl (2016) yang berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, dimana poin pertama dan kedua membahas tentang:

- 1) Tujuan Umum (*common purpose*), Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa organisasi tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.
- 2) Mutualitas (*mutuality*), Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

b. Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi dalam penerapan ekonomi

biru sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah program kegiatan dilakukan.

Tujuan merupakan hal yang penting dalam kolaborasi karena tujuan adalah target yang harus dicapai dalam kolaborasi sehingga harus ada tujuan yang disepakati sebelumnya, dimana tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada di laut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Schrage yang menyatakan bahwa kolaborasi merupakan upaya menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Raharja (2008) juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individu. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa, awalnya organisasi adalah otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatar belakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi atau individu lain.

c. obyektivitas umum

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama organisasi dalam melakukan kolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang

dilimpahkan kepada LSM bersama masyarakat karena mereka yang lebih mengetahui kondisi tersebut.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Thomas dan Perry(2006:) dalam Dimensi Tata Pemerintahan (The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension), Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (joint decision making), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- 1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
 - 2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
 - 3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsensus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik;
 - 4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negosiasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.
- 5). Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*), dalam proses kolaborasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam penelitian ini menghasilkan perjanjian kerjasama yang di tandatangani oleh pihak pertama dalam hal ini pihak swasta dan pihak kedua dalam hal ini lembaga swadaya

masyarakat SOD sangkarrang dan pemerintah sebagai yang mengetahui.

Adapun isi dari surat perjanjian tersebut bahwasanya setelah program pengabdian kepada masyarakat ini selesai selama 6 bulan, akan di limpahkan ke mitra dalam hal ini SOD Sangkarrang, untuk mengelola.

Serta hasil sementara juga dapat dilihat dari kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara masyarakat dan yang lebih paham terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan membantu masyarakat melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Peningkatan kesadaran dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengetahuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi tanpa merusak habitat ekosistem laut.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang telah mengalami peningkatan terhadap penerapan ekonomi sektor maritim secara optimal, peran berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadikan faktor terpenting dalam melakukan interaksi dengan badan-badan di masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat serta swasta. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan dan pelatihan pengembangan potensi dari berbagai lembaga untuk mendukung program tersebut.

Adapun bentuk dari kolaborasi dari 3 aktor yang terlibat dalam kolaborasi program pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini pemerintah kecamatan kepulauan sangkarrang, lembaga swadaya masyarakat (SOD Sangkarrang)

dan swasta yayasan konservasi laut (YKL Indonesia). YKL Indonesia sebagai pihak penyelenggara berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM setempat dalam program pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan SOD Sangkarrang yang merupakan eksekutor dalam program ini karena di nilai lebih mengetahui program pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini tentang rehabilitasi terumbu karang. serta pemerintah kecamatan kepulauan sangkarrang sebagai lokasi dalam program ini juga turut berpartisipasi dalam pengurusan administrasi dan partisipan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penelitian yang dilakukan penulis dengan judul *governance collaboration* sektor maritim dalam penerapan *blue ekonomi* di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan:

1. Peran Komponen Kolaborasi dilihat dari:
 - a. Dialog tatap-muka (*Face to face dialogue*) dalam penerapan *blue economy* sektor maritim di kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota makassar, sudah berjalan dengan baik karna ketika rapat alam mendengarkan pendapat seluruh lembaga transparan dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi.
 - b. Membangun Kepercayaan (*trust building*) terhadap semua organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim, hal ini ditandai dengan keterbukaan para aktor yang berkolaborasi dalam menyampaikan pendapat, informasi serta saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati.
 - c. Komitmen pada proses (*Commitmn to the process*), organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya,

kesadaran bahwa adanya tugas dari masing-masing lembaga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomim tanpa merusak pelestarian lingkungan. akan tetapi masih kurangnya dokumen perjanjian kolaborasi aktor yang terlibat.

- d. Pemahaman Bersama (*shared understanding*), setiap Organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim mampu memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing di dukung dengan adanya kemiripan visi misi dan tujuan dari penerpan ekonomi biru yaitu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat tanpa merusak kelestarian lingkungan laut di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.
 - e. Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*), yaitu masyarakat Kecamatan kepulauan Sangkarrang telah memahami akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan yang menjadikan nelayan nelayan kecil yang menggatungkan kehidupannya pada laut yang tidak terlalu jauh dari wilayah daratan.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, diantaranya faktor pendukung yaitu adanya Kebijakan tentang bahaya merusak lingkungan diatur dalam Undang-Undang, serta adanya Pemberian Bantuan dan pelatihan terhadap masyarakat, Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mejaga ekosistem laut, serta kurangnya anggaran di setiap program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan lagi :

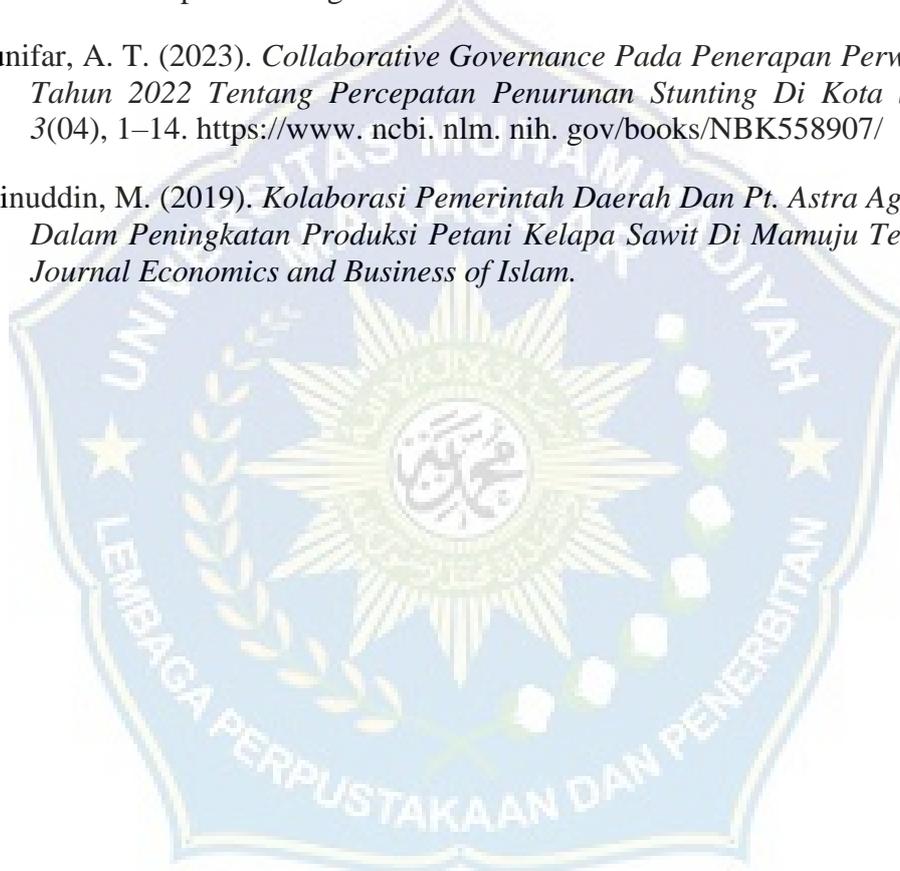
1. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan hal mengenai anggaran yang harusnya lebih baik lagi, agar setiap pelaksanaan program yang berkaitan dengan penerapan ekonomi biru berjalan dengan lebih baik lagi.
2. Pemerintah harus mensosialisasikan dampak dan masalah yang terjadi akibat kerusakan lingkungan laut dan pesisir. agar supaya nelayan kecil yang menggantungkan ekonomi dari pesisir dan laut akan terpenuhi.
3. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, LSM, Swasta dan masyarakat diharapkan mampu lebih ditingkatkan lagi agar penerapan *blue economy* dapat meningkatkan arus perekonomian masyarakat tanpa merusak ekosistem laut sesuai dengan tujuan.
4. Aktor yang terlibat dalam program kolaborasi, setiap program yang di kolaborasikan harus di buatkan dokumen perjanjian kerjasama yang di tanda tangani bersama – sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. , Supriyono, B. , & Domai, T. (2022). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Anggrain, N. W. , & Mashur, D. (2022). *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Arto, R. S. , Prakoso, L. Y. , & Sianturi, D. (2019). *Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi*. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 65–86.
- Banu, N. M. (2020). *Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–31. <https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907>
- Budianto, E. W. H. (2022). *Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review*. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chandra, Y. A. , Rustam, I. , & Safitri, P. (2021). *Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (FAO): Studi Journal of Global Discourse*.
- Gunawan, A. , & Ma`ruf Farid, M. (2020). *Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)*. *Jurnal of Public Sector Innovation*, 1–10.
- Hisyam, M. A. , As, E. , Sariburaja, K. , & . . . (2022). *Against All Odds? Blue Economy and Blue Ocean Maritime Strategy in Seychelles and Mauritius*. *SINERGI: Journal of*

- Iptek, J. , & Lipi, R. (2015). *Rencana Strategis transisi*. 1–6. <https://doi.org/351.077> Ind r
- Kadar, A. (2015). *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 427–442. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.33>
- Keliat, M. (2009). *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(Juli), 19.
- Khairunnisa, F. (2022). *Blue Economic Concept on Protecting Marine Ecosystem in Indonesia and China*. *The Lawpreneurship Journal*.
- Kurniati, K. , Pananrangi, A. R. , & Bahri, S. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan E-Ktp Di Kecamatan Kepulauan Sangkarang Kota Makassar*. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(1), 57–64. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.610>
- Lingkungan, B. A. B. V. K. , Makassar, W. K. , & Fisik, A. K. L. (2008). *kajian lingkungan wilayah kota makassar*. 1–70.
- Mappangara, A. C. (2021). *Sosialisasi Standar dan Prosedur Keselamatan Pelayaran Wilayah Gugus Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar*. *JURNAL TEPAT: Applied Technology Journal for Community Engagement and Services*, 4(1), 38–45. https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v4i1.169
- Mappasere, S. A. , & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif*. In *Metode Penelitian Sosial* (Vol. 33).
- Maulana, R. Y. (2020). *Collaborative governance in the implementation of e-government-based public services inclusion in Jambi Province, Indonesia*. In *Journal of Governance*. researchgate.net.
- Neill, N. O. (2022). *The Political Economy Of Taste: The State And The Porcelain*. August, 1682–1815.
- Palgrave, T. , Heritage, C. , Timothy, D. J. , Nyaupane, G. P. , Crooke, E. , Raffestin, C. , Butler, S. A. , Publications, S. , Eldem, E. , HARVEY, D. C. , Gill, R. , HARVEY, D. C. , Castañeda, Q. E. , Matthews, C. N. , HARVEY, D. C. , Fernández-kelly, E. P. , Shefner, J. , Hampton, M. , Riley, M. , ... Geismar, H. (2010). *analisis struktur kovarian terhadap indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan*. *International Journal of Heritage Studies*, 16(1), 1689–1699.
- Prayuda, R. (2019). *Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean*. *Indonesian Journal of International Relations*.

- Prayuda, R. , & Sary, D. V. (2019). *Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy di Era Masyarakat ASEAN. Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.
- Rupita, R. , Yulianti, Y. , Gaffar, Z. H. , & . . . (2021). *Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Governance*.
- Tianming, G. , & Erokhin, V. (2021). *China-Russia research and education collaboration in the Arctic: opportunities, challenges, and gaps. The Polar Journal*. <https://doi.org/10.1080/2154896x.2021.1889837>
- Yunifar, A. T. (2023). *Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya*. 3(04), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Zainuddin, M. (2019). *Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pt. Astra Agro Lestari Dalam Peningkatan Produksi Petani Kelapa Sawit Di Mamuju Tengah. ... : Journal Economics and Business of Islam*.



L

A

M

P

I

R

A

N





Dok.pelaksanaan program pkm



Dok.wawancara dngn camat kepulauan sangkarrang

PENGALAMAN PROGRAM DAN KEGIATAN



Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Lantebung, Kota Makassar

June 2023 - March 2024

Yayasan KEHATI



Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat "PROTEKSI GAMA" di Pulau Langkai dan Lanjukang, Kota Makassar

May 2021 - October 2023

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)



Aksi Bersama Bersih-bersih Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar

June 2023

PT PLN (Persero) UIP Sulawesi



Fasilitasi Midterm Review Program Kemitraan Wallacea II

March 2023 - May 2023

Burung Indonesia



Pengembangan co-Management Perikanan Kakap-Kerapu Skala Kecil di Sulawesi Selatan

April 2022 - April 2023

Sustainable Fisheries Partnership



Pengelolaan Sampah Pesisir Kota Makassar Melalui Pendekatan Berbasis Circular Economy Sustainable Secara Terintegrasi Guna Mendukung Terciptanya Blue Economy

August 2022 - December 2022

Kedai Reka - Universitas Muhammadiyah Palopo



dok. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat



Dok.wawancara dengan staff pemerintah.



Dok.program kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat

**DATA KELURAHAN
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KOTA MAKASSAR**

NO	KELURAHAN	PENDUDUK			KK	RW	RT	WAJIB KTP	LUAS KM ²	PRA KS
		L	P	L+P						
1	BARRANG LOMPO	2101	2138	4239	1324	4	21	3.456	19,23 Ha	590 Pns / 293 Ks
2	BARRANG CADDI	2242	2280	4522	1164	5	20	2.577	21,00 Ha	512 Pns / 331 Ks
3	KODINGARENG	2318	2274	4592	1227	6	16	3.260	14,00 Ha	172 Pns / 699 Ks
JUMLAH		7206	7272	14478	3715	15	57	9.905	54,23 Ha	1274 Pns / 1323 Ks

MAKASSAR, Januari . 2023
CAMAT
RAMLI, S.Pd
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP. 19710216 199505 1 001

dok.data kelurahan di kecamatan sangkarrang

VISI & MISI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”

- 1 **Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi!**
- 2 **Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan yang Kuat untuk Semua**
- 3 **Restorasi Ruang Kota yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang Sombere & Smart City untuk Semua**

makassar  **MC** **JANGAN BIARKAN MAKASSAR MUNDUR LAGI**

dok.visi misi kecamatan sangkarrang



dok penghargaan kecamatan sangkarrang





dok. Papan informasi SODSangkarrang



dok.sekretariat SOD sangkarrang



dok wawancara dengan staff pemerintahan





dok wawancara dengan masyarakat



Dok lokasi penelitian



dok.musyawarah pemerintah dan LSM

PEDOMAN WAWANCARA

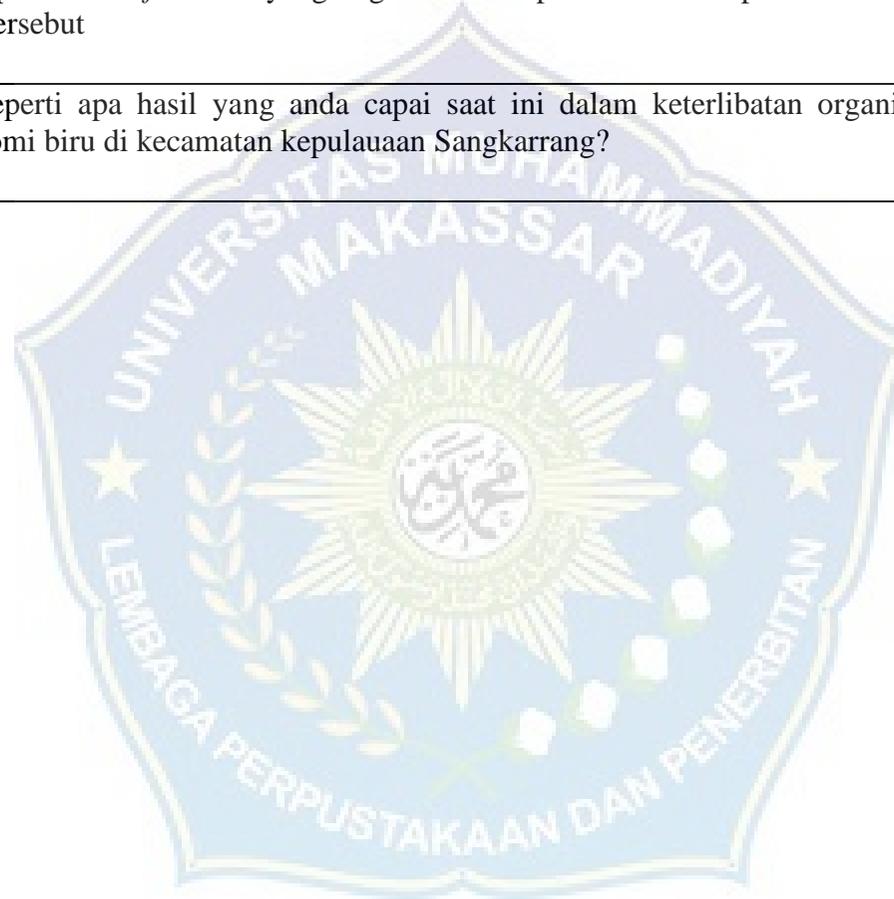
INDIKATOR	PERTANYAAN
Dialog antar-muka (<i>face to face to dialogue</i>)	1. Bagaimana cara anda menjalin hubungan komunikasi yang efektif antara organisasi yang terlibat dalam penerapan Ekonomi biru di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar?
➤ Komunikasi	2. Apakah yang terlibat dalam kolaborasi sering mengadakan pertemuan/rapat atau forum musyawarah untuk membahas permasalahan permasalahan tentang ekonomi biru?
➤ Musyawarah	3. Apakah anda terlibat langsung dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang?
➤ Keterbukaan	4. Apasaja kontribusi yang dilakukan oleh organisasi ini berikan dalam penerapan ekonomi biru?
	5. Apa saja tugas dan tanggung jawab organisasi ini dalam penerapan ekonomi biru di kecamatan kepulauan sangkarrang ?
Membangun Kepercayaan (<i>trust Building</i>)	6. Organisasi apa saja yang terlibat secara penuh dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di kecamatan kepulauan Sangkarrang kota Makassar?
➤ Empati	7. Apakah anda mengetahui tugas dan tanggung jawab anda dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim di Kecamatan kepulauan Sangkarrang Kota Makassar?
➤ Kredibilitas	8. Apakah ada aturan yang disepakati bersama oleh organisasi yang terlibat dalam penerapan ekonomi biru sektor maritim?
➤ Kedekatan Sosial	9. Siapakah organisasi yang mempunyai wewenang secara penuh dalam penerapan ekonomi biru?
	10. Apasaja masalah yang dihadapi oleh organisasi selama terlibat dalam penerapan ekonomi biru Di kecamatan Kepulauan Sangkarrang?
	11. Bagaimana jalur koordinasi yang organisasi terapkan dalam penerapan ekonomi biru di Kecamatan kepulauan sangkarrang?

--	--



	12. Apakah latar belakang organisasi ini bergabung dalam penerapan Blue economy di Kecamatan kkgkepulauan sangkarrang ?
	13. Apakah keterlibatan organisasi ini dalam penerapan ekonomi biru ini merupakan inisiatif sendiri atau ada arahan atau perintah dari pihak tertentu ?
	14. Bagaimana sikap organisasi ini dalam memberikan pemahaman pada masyarakat atas pentingnya Menjaga dan melestarikan lingkungan yang selaras dengan ekonomi biru?
Komitmen pada Kolaborasi (<i>commitmn to the process</i>)	15. Apakah organisasi ini memiliki kesepakatan secara tertulis terkait penerapan ekonomi biru?
➤ Pengakuan Bersama	16. Seperti apa peran organisasi ini dalam menjaga lingkungan laut yang selaras dengan ekonomi biru?
➤ Apresiasi	17. Bagaimana cara organisasi ini melakukan pertanggung jawaban terhadap peran yang diambil dalam Penerapan ekonomi biru sektor maritim ?
➤ Monitoring	18. Apa tujuan organisasi ini terlibat dalam penerapan blue ekonomi ini?
	19. Bagaimana anda mampu menjaga konsistensi atau berkomitmen dalam kolaborasi dalam hal ini penerapan ekonomi biru?
	20. Apakah setiap usulan yang diajukan setiap organisasi dapat diterima secara seksama ?
Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	21. Apa visi dan misi organisasi ini sehingga terlinbat dalam penerapan ekonomi biru?
➤ Kesamaan Visi dan Misi	22. Apa tujuan organisasi ini sehingga terlibat dalam penerapan ekonomi biru?
➤ Kesamaan Tujuan ➤ <i>Common Objectives</i> (obyektivitas umum)	23. Mengapa tidak ada aturan yang tertulis terkait kolaborasi organisasi?
Dampak Sementara (<i>entermediate outcomes</i>)	24. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam kolaborasi penrapan ekonomi biru ?

	25. Bagaimana cara organisasi ini untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan eksistensi ekonomi biru?
	26. Apakah ada <i>feedback</i> yang organisasi ini peroleh terhadap keterlibatannya dalam perepan ekonomi biru tersebut
	27. Seperti apa hasil yang anda capai saat ini dalam keterlibatan organisasi terhadap penerapan ekonomi biru di kecamatan kepulauan Sangkarrang? ?



RIWAYAT HIDUP PENULIS



FATUR RAHMAN, Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Januari 2002 dari pasangan Ayahanda bernama Najamuddin dan ibu yang bernama Husna wati. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2007 di SD Inpres Barrang Lompo tamat pada tahun 2014, masuk sekolah menengah pertama di SMPN 28 Makassar dan tamat pada tahun 2017, melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 11 Makassar dan tamat pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan pada program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Riwayat Organisasi yang pernah diikuti yakni Organisasi internal Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unismuh Makassar, diamanahi sebagai sekretaris Bidang Keilmuan BEM Fisip periode 2023/2024
- Pernah mengikuti Darul Arqam Dasar di Pusat Dakwa Muhammadiyah Makassar tahun 2022.
- Ikut serta dalam kampus mengajar angkatan ke 5 yang diadakan oleh KEMENDIKBUDRISTEK pada tahun 2023.
- Ikut serta dalam komunitas pelestarian lingkungan yang di inisiasi oleh pemuda yang ada di kepulauan Sangkarrang.